



BERITA RESMI STATISTIK

No. 51/05/Th. XXIX, 5 Mei 2026



Hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS 2025)

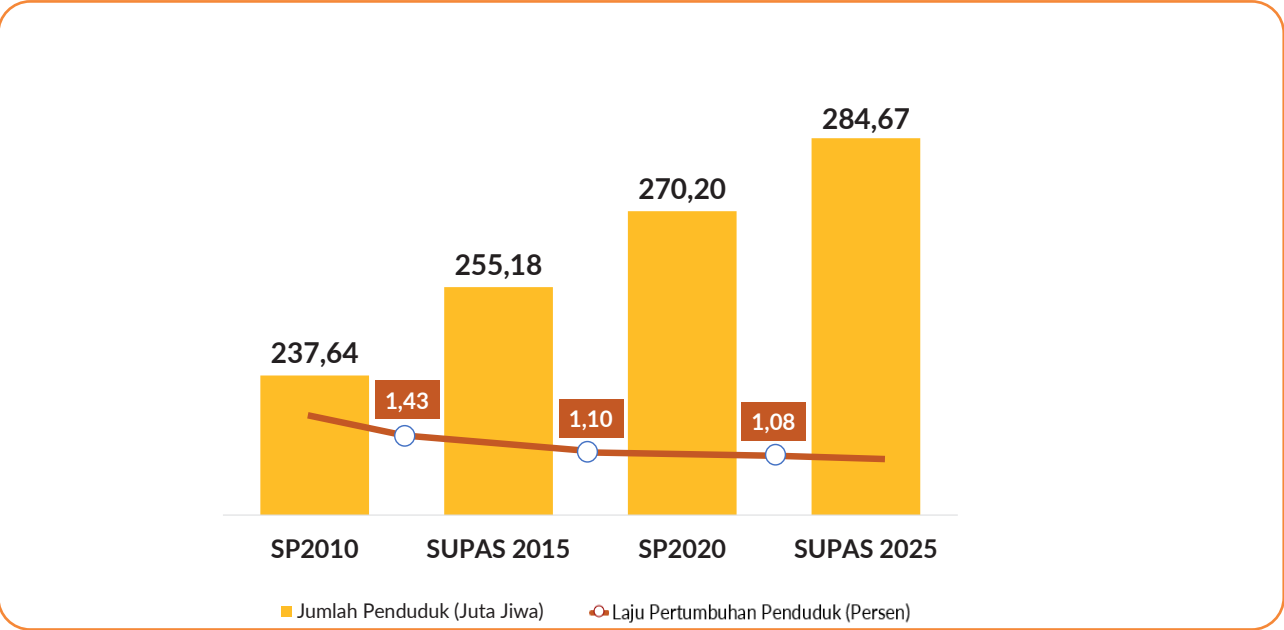
- Penduduk Indonesia tumbuh melambat, dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk tahunan sebesar 1,08 persen dalam lima tahun terakhir.
- Rasio ketergantungan mengalami peningkatan selama periode lima tahun terakhir, mencapai 45,05 persen di tahun 2025.
- Angka Kelahiran Total (TFR) Indonesia sebesar 2,13 mendekati *Replacement Level*.
- Angka Kematian Bayi (IMR) terus menurun mencapai 14,12 dan Angka Kematian Ibu Melahirkan (MMR) juga terus menurun mencapai 144.
- Sebanyak 15 dari 1.000 penduduk Indonesia usia 5 tahun ke atas bertempat tinggal di provinsi yang berbeda dibandingkan dengan lima tahun sebelumnya.
- Indonesia saat ini berada pada fase *ageing population* dengan persentase penduduk lanjut usia mencapai 11,97 persen.



1. Struktur Penduduk

1.1. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Indonesia hasil SUPAS 2025 mencapai 284,67 juta jiwa. Selama periode 2010–2025, jumlah penduduk mengalami peningkatan dari 237,64 juta jiwa hasil SP2010 menjadi 284,67 juta jiwa hasil SUPAS 2025. Sementara itu, laju pertumbuhan penduduk Indonesia mengalami perlambatan menjadi 1,08 persen per tahun dalam 5 tahun terakhir (Gambar 1).



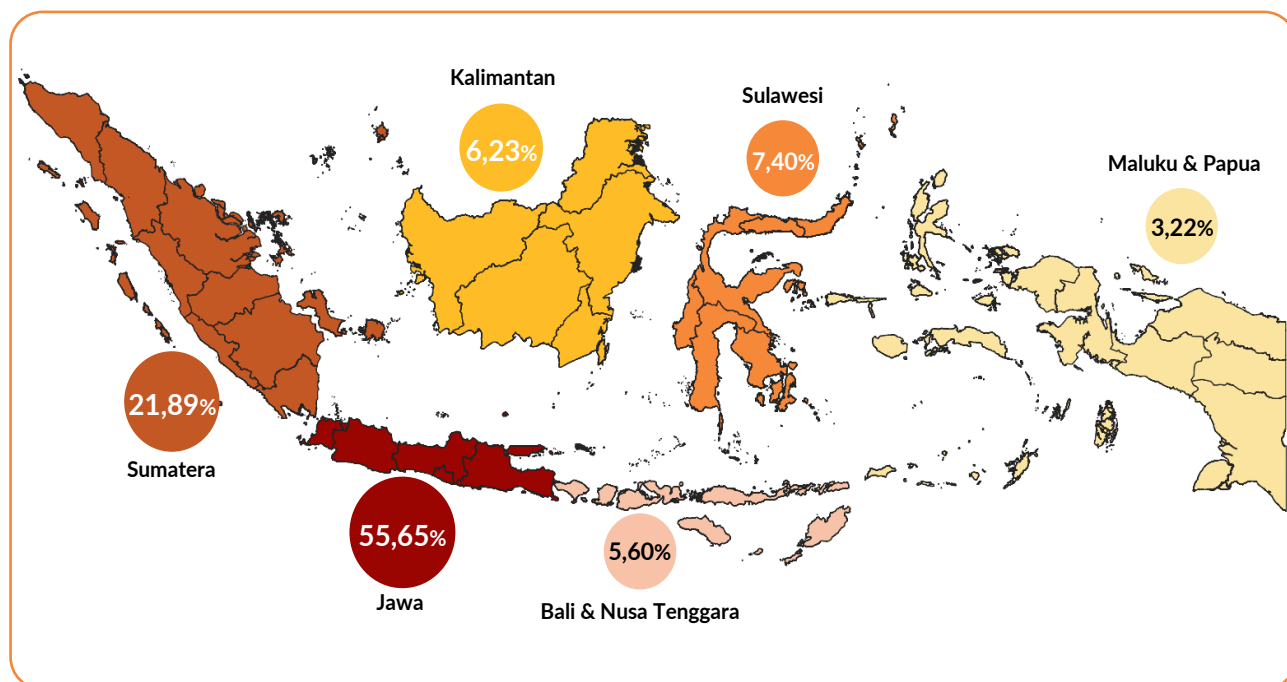
Gambar 1. Jumlah Penduduk (juta jiwa) dan Laju Pertumbuhan Penduduk (persen) Indonesia, SP2010–SUPAS 2025

Penyajian gambar dalam berita resmi statistik ini bersumber dari sensus dan survei kependudukan yang pernah dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, diantaranya:

1. Sensus Penduduk 2010 (SP2010) yaitu pendataan lengkap seluruh penduduk Indonesia untuk menyediakan informasi jumlah, persebaran, dan karakteristik penduduk yang dilaksanakan tahun 2010;
2. Survei Penduduk Antar Sensus 2015 (SUPAS 2015) yaitu survei kependudukan yang dilakukan di antara dua sensus untuk memutakhirkan indikator demografi pada tahun 2015;
3. Sensus Penduduk 2020 (SP2020) yaitu pendataan lengkap seluruh penduduk Indonesia untuk menyediakan informasi jumlah, persebaran, dan karakteristik penduduk yang dilaksanakan tahun 2020;
4. *Long Form* Sensus Penduduk 2020 (LF SP2020) yaitu pendataan lanjutan berbasis sampel dari Sensus Penduduk 2020 untuk menghasilkan indikator utama kependudukan seperti fertilitas, mortalitas, migrasi, disabilitas, ketenagakerjaan, dan perumahan yang lebih rinci; dan
5. Survei Penduduk Antar Sensus 2025 (SUPAS 2025) yaitu survei kependudukan yang dilakukan di antara dua sensus untuk memutakhirkan indikator demografi pada tahun 2025.

1.2. Persebaran Penduduk

Hasil SUPAS 2025 menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, yaitu sebanyak 158,41 juta jiwa (55,65 persen), Pulau Sumatera dengan jumlah penduduk sebanyak 62,32 juta jiwa (21,89 persen). Sebanyak 15,95 juta (5,60 persen) penduduk Indonesia tinggal di Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi masing-masing ditempati oleh 17,75 juta jiwa (6,23 persen) dan 21,06 juta jiwa (7,40 persen) penduduk Indonesia. Sementara itu, jumlah penduduk yang paling sedikit terdapat di wilayah timur Indonesia yaitu Pulau Maluku dan Papua dengan jumlah penduduk 9,18 juta jiwa (3,22 persen) dari total penduduk Indonesia (Gambar 2).



Catatan: Perbedaan angka di belakang koma disebabkan oleh pembulatan angka.

Gambar 2. Persebaran Penduduk (persen) Menurut Pulau di Indonesia, Hasil SUPAS 2025

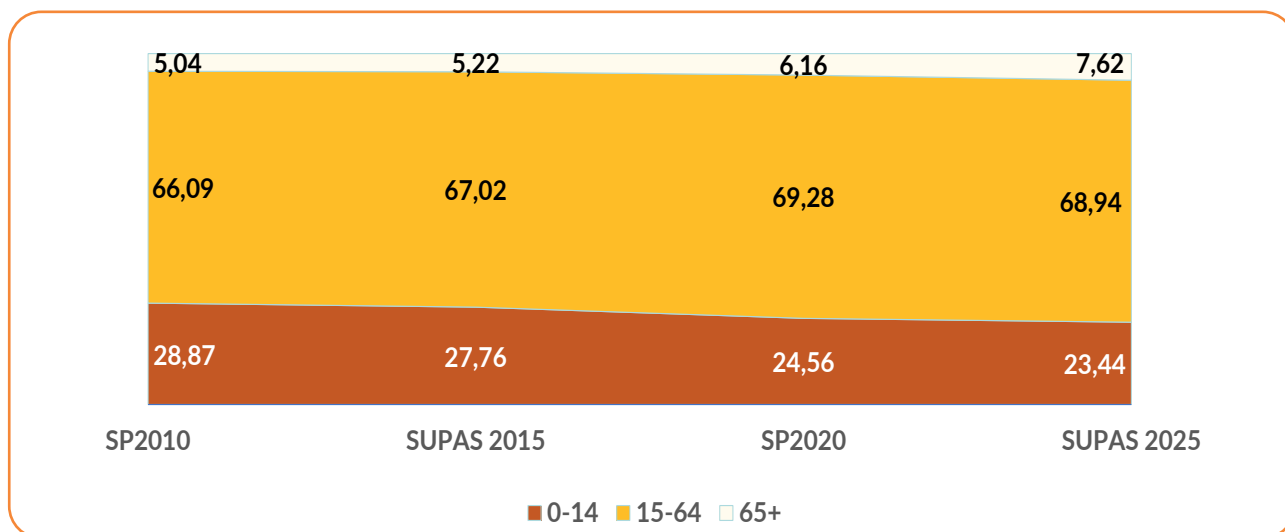
1.3. Rasio Jenis Kelamin

Rasio jenis kelamin menggambarkan perbandingan jumlah penduduk laki-laki terhadap perempuan dalam suatu populasi. Berdasarkan hasil SUPAS 2025, jumlah penduduk laki-laki di Indonesia sebanyak 143.644.742 jiwa atau 50,46 persen dari seluruh penduduk, sedangkan jumlah penduduk perempuan sebanyak 141.022.511 jiwa atau 49,54 persen dari seluruh penduduk. Berdasarkan komposisi jenis kelamin tersebut, rasio jenis kelamin di Indonesia tercatat sebesar 102, yang berarti terdapat sekitar 102 laki-laki untuk setiap 100 perempuan di Indonesia.

Jika dilihat menurut provinsi, hasil SUPAS 2025 menunjukkan rasio jenis kelamin penduduk Indonesia yang bervariasi antarwilayah (Lampiran 1). Rasio jenis kelamin tertinggi tercatat di Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Tengah (114), diikuti oleh Papua Barat dan Kalimantan Utara (110). Angka ini menunjukkan terdapat 114 laki-laki di Papua Pegunungan dan Papua Tengah, serta 110 laki-laki di Papua Barat dan Kalimantan Utara untuk setiap 100 perempuan di provinsi tersebut. Rasio jenis kelamin di DKI Jakarta, Bali, dan Nusa Tenggara Timur adalah 100, menunjukkan keseimbangan antara jumlah laki-laki dan perempuan di provinsi tersebut. Terdapat tiga provinsi di Indonesia dengan rasio jenis kelamin di bawah 100, yaitu Sulawesi Selatan (99), Jawa Timur (99), dan DI Yogyakarta (98) yang berarti jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari laki-laki.

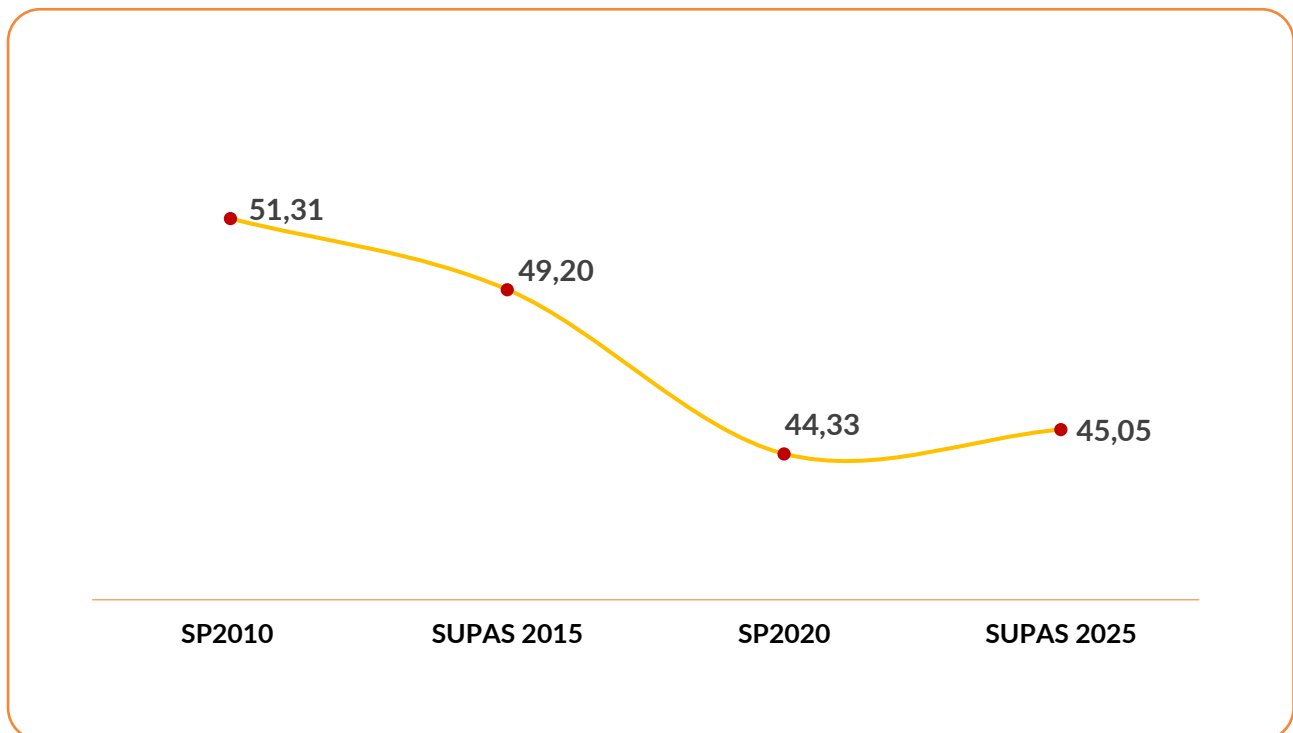
1.4. Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Rasio Ketergantungan

Hasil SUPAS 2025 menunjukkan bahwa proporsi penduduk usia produktif (15–64 tahun) sebesar 68,94 persen, mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan hasil SP2010 sebesar 66,09 persen (Gambar 3). Sebaliknya, penduduk usia nonproduktif (0–14 tahun dan 65 tahun ke atas) menunjukkan pola yang berbeda, untuk kelompok umur 0–14 tahun mengalami penurunan dibandingkan SP2010, dari 28,87 persen menjadi 23,44 persen, sedangkan untuk kelompok umur 65 tahun ke atas menunjukkan peningkatan dari SP2010, yaitu dari 5,04 persen menjadi 7,62 persen. Perubahan komposisi penduduk kelompok umur tersebut menunjukkan pergeseran struktur umur penduduk yang mulai menyempit di kelompok umur 0–14 tahun dan melebar di kelompok umur 15–64 tahun.



Gambar 3. Komposisi Penduduk (persen) Menurut Kelompok Umur Indonesia, SP2010–SUPAS 2025

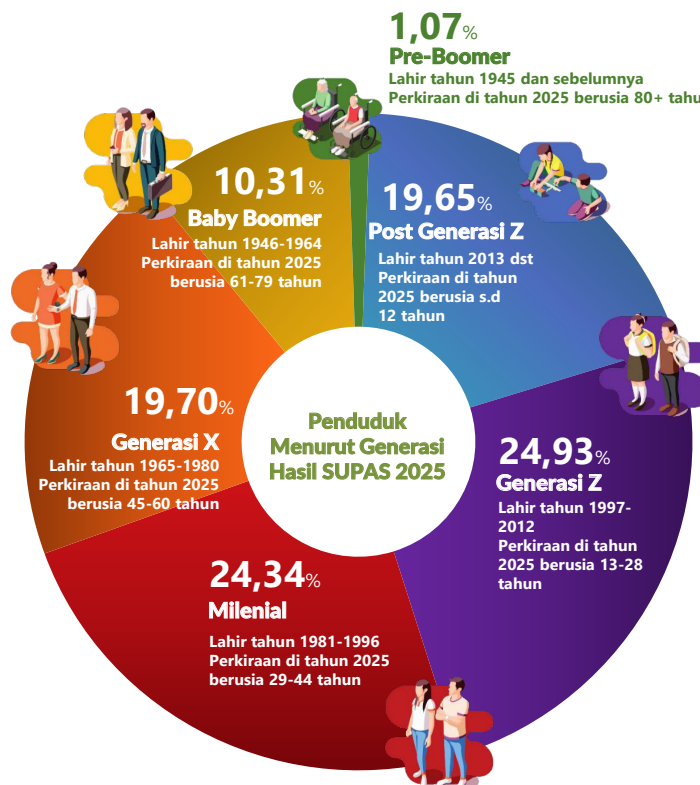
Jika memerhatikan komposisi kelompok umur tersebut maka dapat dihasilkan indikator rasio ketergantungan yang merupakan perbandingan penduduk usia nonproduktif (0–14 tahun dan 65 tahun ke atas) dengan penduduk usia produktif (15–64 tahun). Hasil SUPAS 2025 menunjukkan rasio ketergantungan sebesar 45,05, yang artinya dari 100 orang penduduk usia produktif menanggung 45 orang penduduk usia nonproduktif (Gambar 4). Rasio ketergantungan pada periode 2010–2020 menunjukkan tren yang menurun dari 51,31 pada SP2010 menjadi 44,33 pada SP2020. Hasil SUPAS 2025 menunjukkan rasio ketergantungan meningkat mencapai 45,05 untuk nasional, dan rasio ketergantungan provinsi dapat dilihat pada Lampiran 1. Selama periode 2015–2025, rasio ketergantungan masih berada di bawah 50, dan Indonesia masih dalam fase bonus demografi.



Gambar 4. Rasio Ketergantungan Indonesia, SP2010–SUPAS 2025

1.5. Penduduk Menurut Generasi

Komposisi penduduk menurut generasi memberikan gambaran yang komprehensif tentang dinamika demografi. Berdasarkan tahun kelahiran, penduduk dapat dikelompokkan menjadi *Generasi Pre-Boomer*, *Baby Boomer*, *Generasi X*, *Milenial*, *Generasi Z*, dan *Post Generasi Z*. Berdasarkan Gambar 5, *Generasi Z* menjadi kelompok terbesar dengan persentase 24,93 persen, diikuti oleh *Generasi Milenial* sebesar 24,34 persen. Kombinasi kedua generasi muda ini mencakup hampir separuh populasi Indonesia, menunjukkan dominasi generasi produktif dalam struktur penduduk saat ini. Kontribusi dari empat generasi lain mencapai 50,73 persen yang terdiri dari *Generasi X* sebesar 19,70 persen, *Post Generasi Z* sebesar 19,65 persen, *Generasi Baby Boomer* sebesar 10,31 persen, dan *Pre-Boomer* sebesar 1,07 persen.



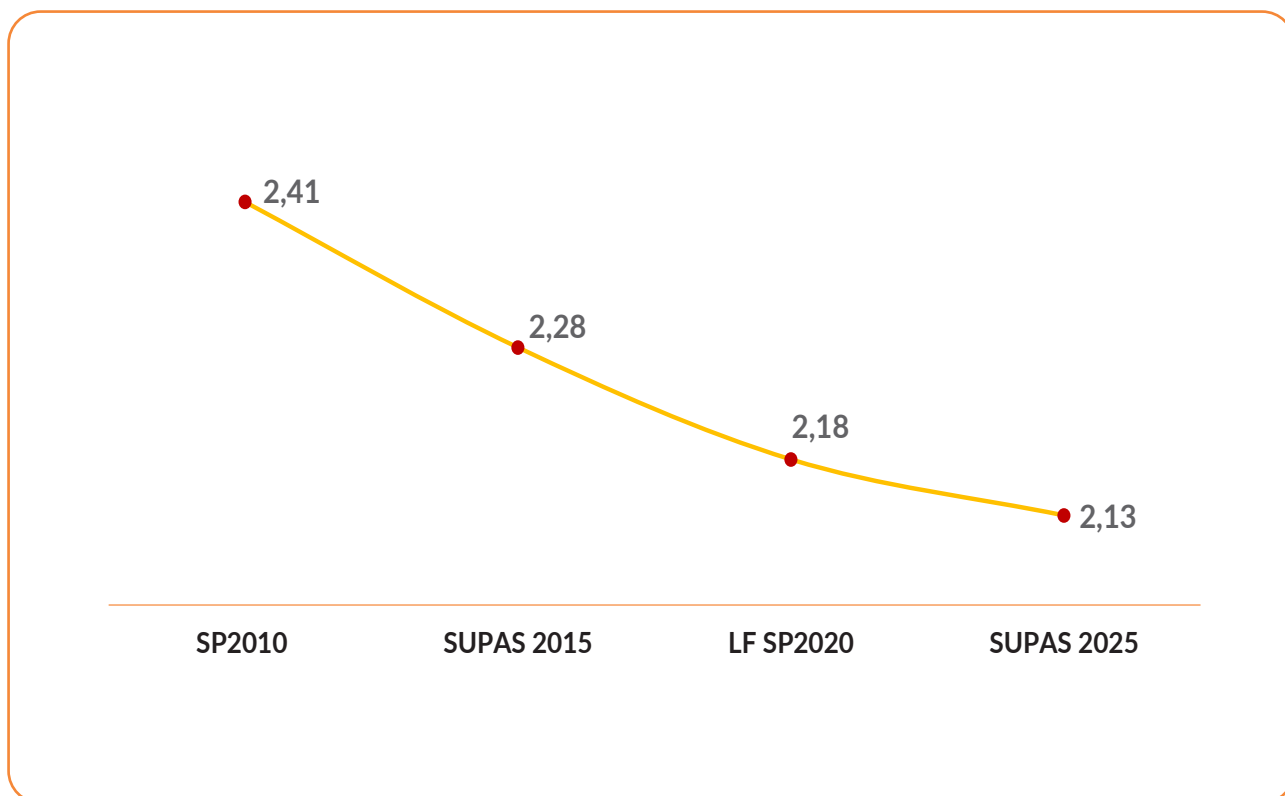
Sumber pengklasifikasian: William H. Frey analysis of Census Bureau Population Estimates (25 Juni, 2020)

Gambar 5. Persentase Penduduk Menurut Generasi Indonesia, Hasil SUPAS 2025

2. Fertilitas

2.1. Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)

Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR) menggambarkan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan hidup oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya (15–49 tahun). Hasil SUPAS 2025 menunjukkan bahwa TFR Indonesia tercatat sebesar 2,13, mengalami penurunan dibandingkan dengan hasil LF SP2020 yang sebesar 2,18 (Gambar 6). Tren penurunan masih konsisten selama lebih dari satu dekade terakhir yaitu dari 2,41 pada SP2010. Penurunan ini menegaskan bahwa tren penurunan fertilitas masih berlanjut meskipun dengan laju yang lebih landai dibandingkan periode-periode sebelumnya. TFR hasil SUPAS 2025 mengindikasikan bahwa Indonesia semakin mendekati *replacement level* (2,10).

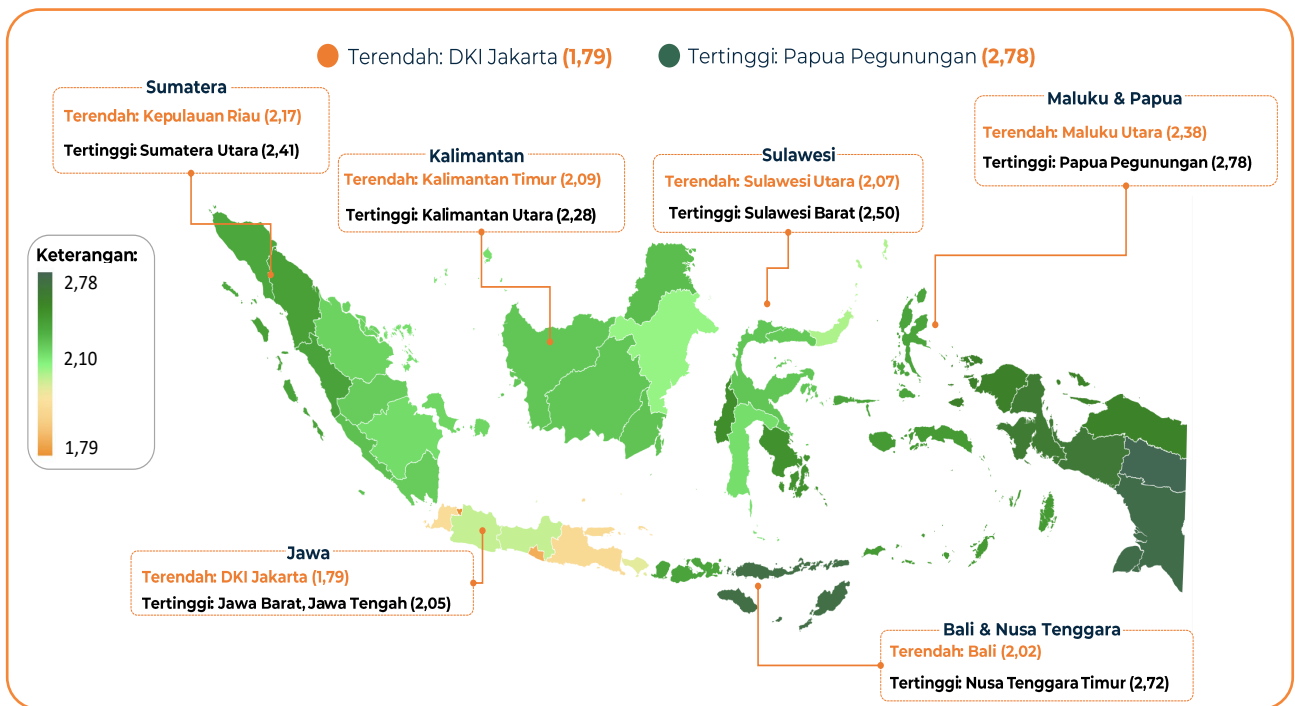


Gambar 6. Tren Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR) Indonesia, SP2010–SUPAS 2025

Hasil SUPAS 2025 menunjukkan bahwa tingkat fertilitas di Indonesia bervariasi antarprovinsi. DKI Jakarta merupakan provinsi dengan TFR terendah yaitu sebesar 1,79, sedangkan Papua Pegunungan merupakan provinsi dengan TFR tertinggi yaitu sebesar 2,78 (Gambar 7). Disparitas ini mencerminkan perbedaan karakteristik sosial, budaya, ekonomi, dan akses layanan kesehatan reproduksi antarwilayah.

Gambar 7 juga memperlihatkan variasi TFR antarprovinsi pada masing-masing pulau. Di Pulau Sumatera, TFR terendah tercatat di Kepulauan Riau (2,17), sedangkan tertinggi di Sumatera Utara (2,41). Di Pulau Jawa, TFR terendah berada di DKI Jakarta (1,79), sementara TFR tertinggi tercatat di Jawa Barat dan Jawa Tengah (masing-masing 2,05). Di Pulau Kalimantan, TFR terendah terdapat di Kalimantan Timur (2,09), sedangkan tertinggi di Kalimantan Utara (2,28). Di Pulau Sulawesi, TFR terendah tercatat di Sulawesi Utara (2,07), sedangkan tertinggi di Sulawesi Barat (2,50).

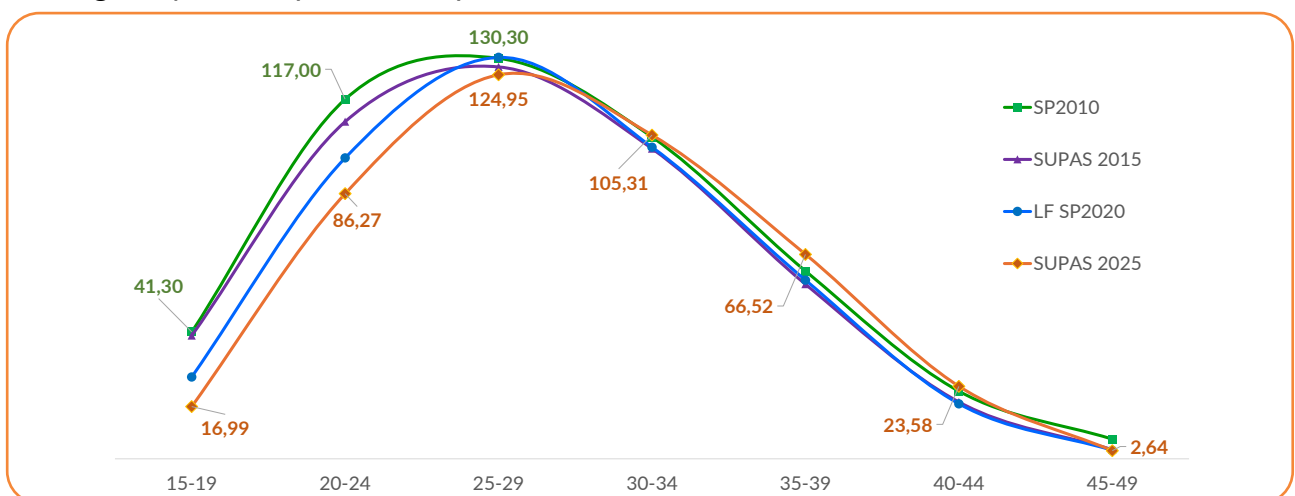
Di wilayah Bali dan Nusa Tenggara, TFR terendah berada di Bali (2,02), sementara tertinggi di Nusa Tenggara Timur (2,72). Adapun di wilayah Maluku dan Papua, TFR relatif lebih tinggi dibandingkan wilayah lain, dengan TFR terendah di Maluku Utara (2,38) dan tertinggi di Papua Pegunungan (2,78). TFR provinsi dan ASFR 15–19 tahun dapat dilihat pada Lampiran 2.



Gambar 7. Angka Kelahiran Total/ Total Fertility Rate (TFR) Menurut Provinsi di Indonesia, Hasil SUPAS 2025

2.2. Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur Tertentu/ Age Specific Fertility Rate (ASFR)

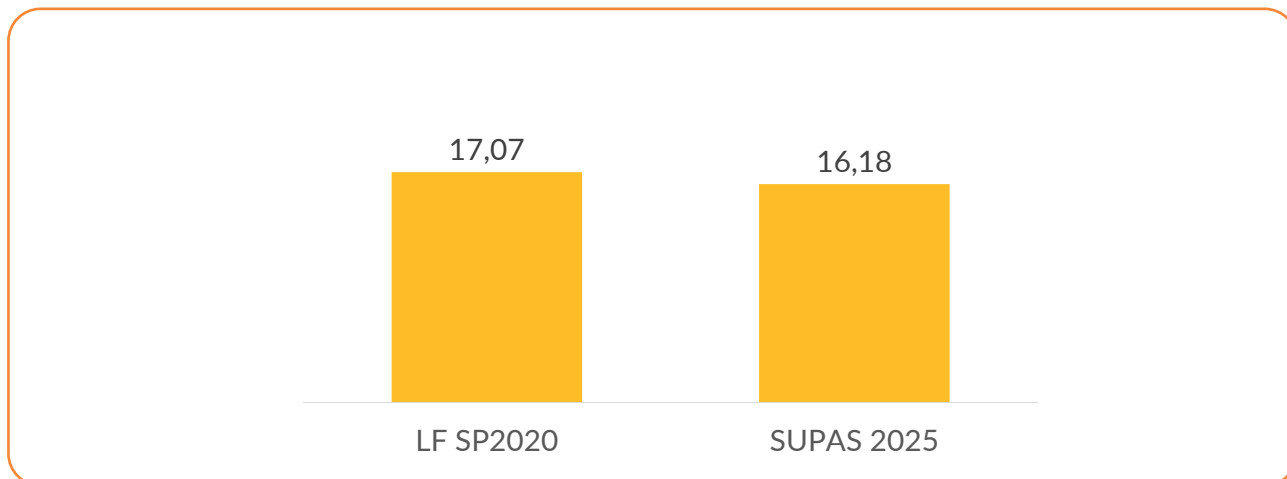
Age Specific Fertility Rate (ASFR) menggambarkan jumlah kelahiran hidup per 1.000 perempuan pada kelompok umur tertentu. Gambar 8 memperlihatkan tren ASFR selama periode 2010–2025 yang menunjukkan adanya penurunan fertilitas, terutama pada perempuan usia 15–24 tahun. Pada kelompok umur 15–19 tahun, ASFR terus menurun dari 41,30 kelahiran per 1.000 perempuan pada SP2010 menjadi 16,99 pada SUPAS 2025. Sementara itu, puncak fertilitas selama periode tersebut masih berada pada kelompok umur 25–29 tahun, meskipun mengalami penurunan dari 130,30 menjadi 124,95. Di sisi lain, terjadi pergeseran pola fertilitas dibandingkan tahun sebelumnya yang ditandai dengan meningkatnya ASFR pada kelompok umur 30–44 tahun berdasarkan hasil SUPAS 2025.



Gambar 8. Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur/ Age Specific Fertility Rate (ASFR) Indonesia, SP2010–SUPAS 2025

2.3. Angka Kelahiran Kasar/*Crude Birth Rate (CBR)*

Angka Kelahiran Kasar/*Crude Birth Rate (CBR)* adalah angka yang menunjukkan banyaknya kelahiran hidup pada tahun tertentu per 1.000 penduduk. Hasil SUPAS 2025 mencatat terdapat 16,18 kelahiran hidup per 1.000 penduduk Indonesia (Gambar 9). Angka ini menurun sebesar 0,89 poin dibandingkan hasil LF SP2020.

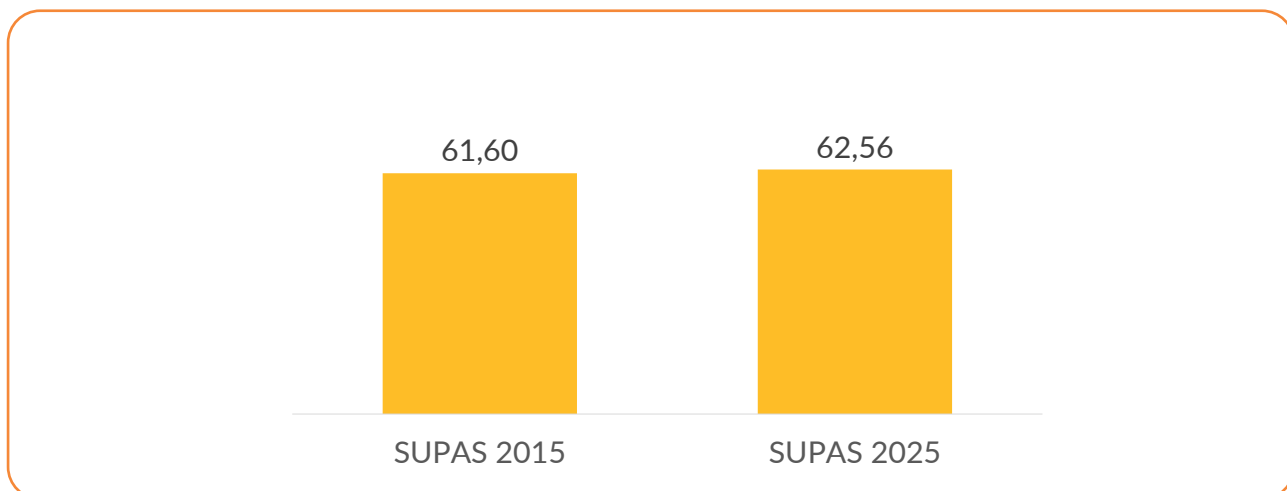


Gambar 9. Angka Kelahiran Kasar/ *Crude Birth Rate (CBR)* Indonesia, LF SP2020–SUPAS 2025

Menurut hasil SUPAS 2025, angka CBR bervariasi antarprovinsi. Papua Pegunungan merupakan provinsi dengan angka CBR tertinggi sebesar 22,26, sedangkan DI Yogyakarta merupakan provinsi dengan angka terendah sebesar 12,98 (Lampiran 2).

2.4. Angka Prevalensi Penggunaan Kontrasepsi/*Contraceptive Prevalence Rate (CPR)*

Angka Prevalensi Penggunaan Kontrasepsi/*Contraceptive Prevalence Rate (CPR)* merupakan indikator yang menggambarkan persentase perempuan kawin umur 15–49 tahun atau pasangannya yang sedang menggunakan metode kontrasepsi, baik modern maupun tradisional. Hasil SUPAS 2025 menunjukkan angka CPR sebesar 62,56 persen (Gambar 10). Dibandingkan dengan tahun 2015, CPR mengalami peningkatan sebesar 0,96 persen poin.

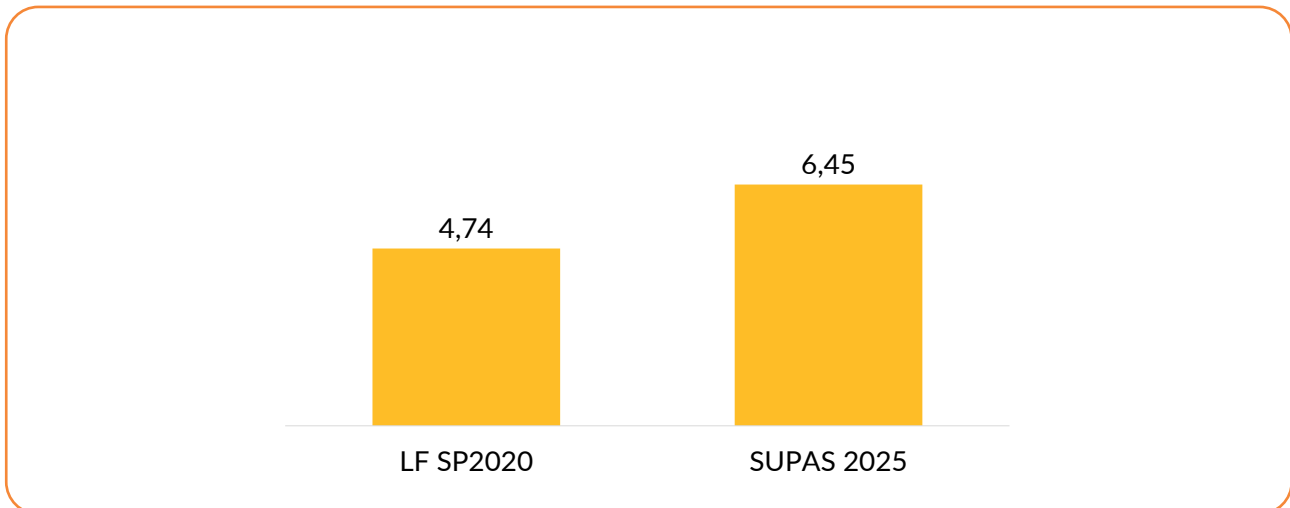


Gambar 10. Angka Prevalensi Penggunaan Kontrasepsi/*Contraceptive Prevalence Rate (CPR)* Indonesia, SUPAS 2015–SUPAS 2025

3. Mortalitas

3.1. Angka Kematian Kasar/*Crude Death Rate* (CDR)

Angka Kematian Kasar/*Crude Death Rate* (CDR) adalah angka yang menunjukkan banyaknya kematian yang terjadi di suatu wilayah per 1.000 penduduk pada suatu periode tertentu. Berdasarkan hasil SUPAS 2025, CDR di Indonesia sebesar 6,45 mengindikasikan terdapat 6 hingga 7 kematian per 1.000 penduduk Indonesia (Gambar 11). Dibandingkan hasil LF SP2020, terdapat kenaikan 1,71 poin.

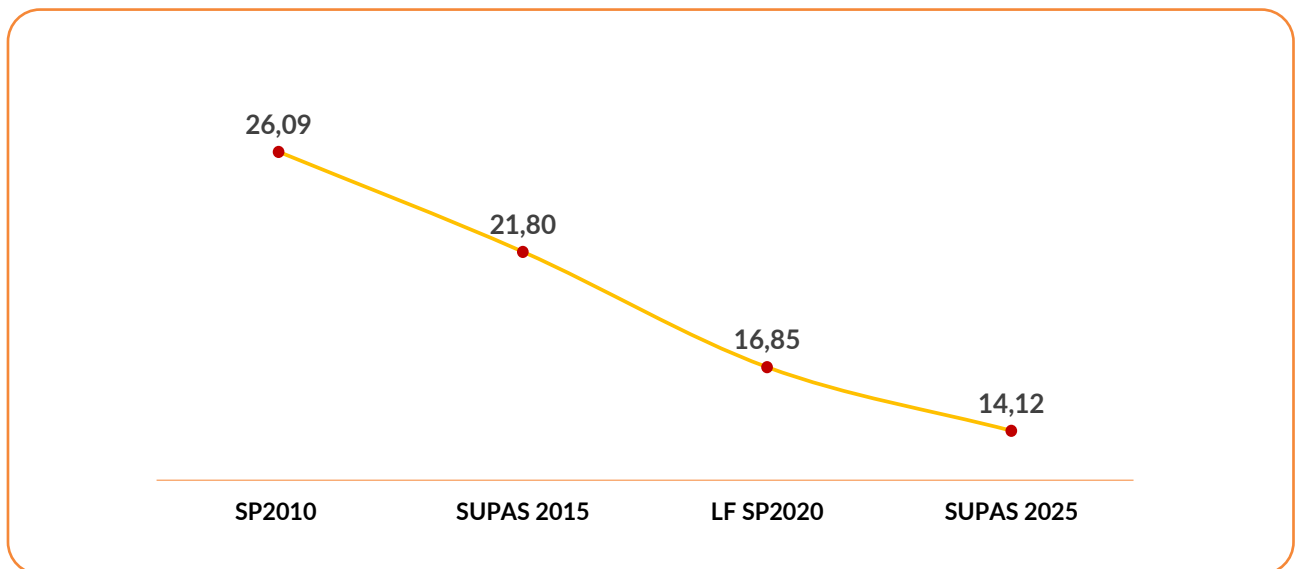


Gambar 11. Angka Kematian Kasar/ *Crude Death Rate* (CDR) Indonesia, LF SP2020–SUPAS 2025

3.2. Angka Kematian Penduduk Usia Dini

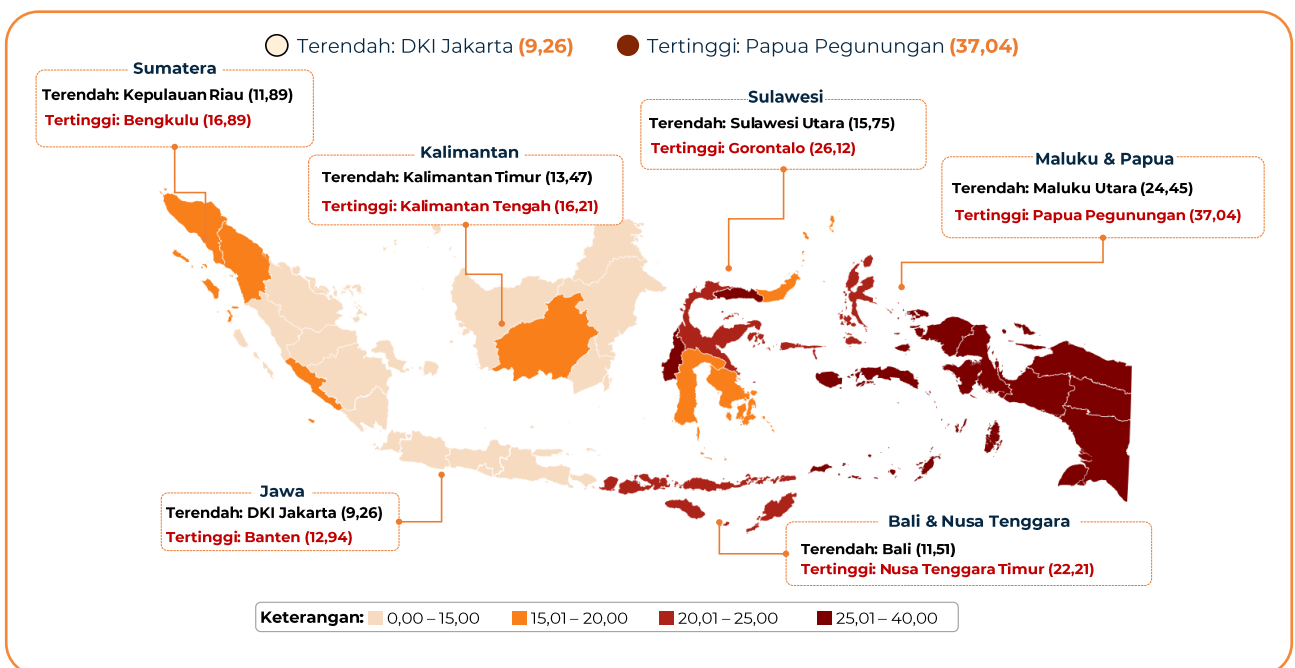
Angka kematian penduduk usia dini digambarkan oleh beberapa indikator yaitu Angka Kematian Neonatal (*Neonatal Mortality Rate*/NMR), Angka Kematian Bayi (*Infant Mortality Rate*/IMR), Angka Kematian Anak (*Child Mortality Rate*/CMR), dan Angka Kematian Balita (*Under Five Mortality Rate*/U5MR). NMR merujuk kematian bayi umur 0–28 hari, IMR merujuk kematian bayi sebelum umur 1 tahun, CMR merujuk kematian anak umur 1 sampai 4 tahun, dan U5MR merujuk kematian anak sebelum umur 5 tahun.

IMR menunjukkan banyaknya kematian bayi berusia di bawah satu tahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun tertentu. Hasil SUPAS 2025 mencatat IMR Indonesia sebesar 14,12 kematian bayi, yang berarti angka ini telah menurun hampir setengahnya jika dibandingkan dengan hasil SP2010 (sebesar 26,09). Hasil SUPAS 2025 juga menunjukkan terdapat disparitas IMR antarprovinsi. Provinsi DKI Jakarta mencatatkan IMR terendah sebesar 9,26, sementara Provinsi Papua Pegunungan masih memiliki IMR tertinggi yakni mencapai 37,04.



Gambar 12. Angka Kematian Bayi/ Infant Mortality Rate (IMR) Indonesia, SP2010–SUPAS 2025

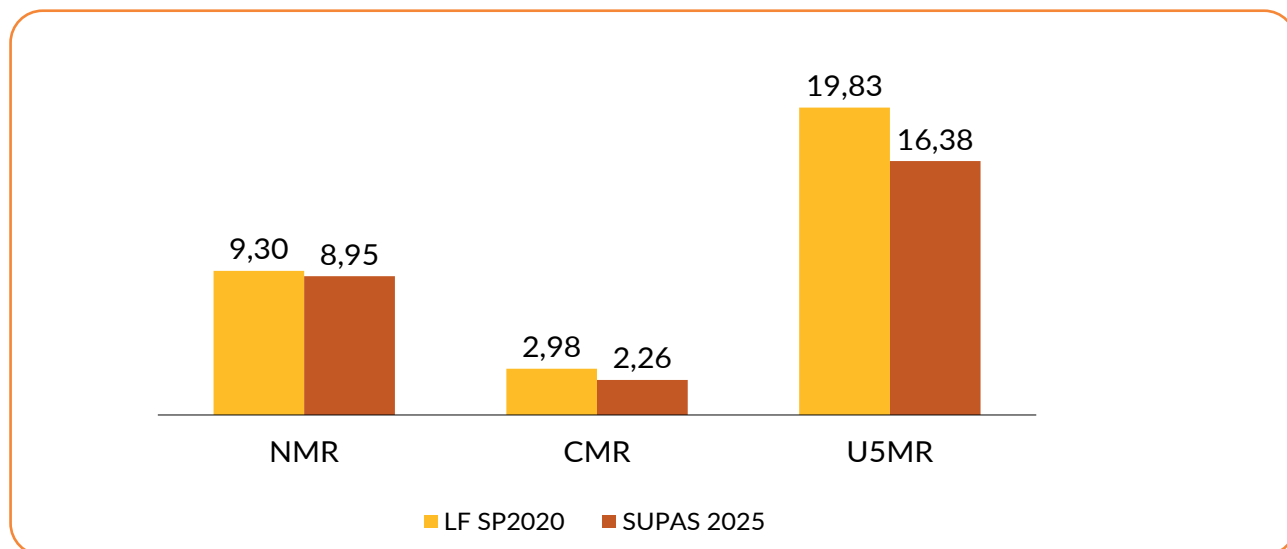
IMR mencerminkan derajat kesehatan masyarakat. Di Pulau Sumatera, provinsi dengan IMR tertinggi adalah Provinsi Bengkulu (16,89) dan terendah Provinsi Kepulauan Riau (11,89). Provinsi dengan IMR tertinggi di Pulau Jawa yaitu Provinsi Banten (12,94) dan IMR terendah adalah Provinsi DKI Jakarta (9,26). Sementara itu di Pulau Bali dan Nusa Tenggara, Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki IMR tertinggi (22,21) dan yang terendah adalah Provinsi Bali (11,51). Di Pulau Kalimantan, Provinsi Kalimantan Tengah merupakan provinsi dengan IMR tertinggi (16,21) dan Provinsi Kalimantan Timur terendah (13,47). IMR tertinggi di Pulau Sulawesi terdapat pada Provinsi Gorontalo (26,12), sedangkan IMR terendah terdapat pada Provinsi Sulawesi Utara (15,75). Di Pulau Maluku dan Papua, IMR tertinggi terdapat pada Provinsi Papua Pegunungan (37,04), sedangkan IMR terendah terdapat pada Provinsi Maluku Utara (24,45) (Gambar 13).



Gambar 13. Angka Kematian Bayi/ Infant Mortality Rate (IMR) Menurut Provinsi di Indonesia, Hasil SUPAS 2025

NMR mencerminkan keadaan kesehatan ibu dan bayi, terutama pada tahap kehidupan bayi yang paling rentan. Hasil SUPAS 2025 menunjukkan NMR sebesar 8,95 dan mengalami penurunan dibandingkan hasil LF SP2020 sebesar 9,30 (Gambar 14).

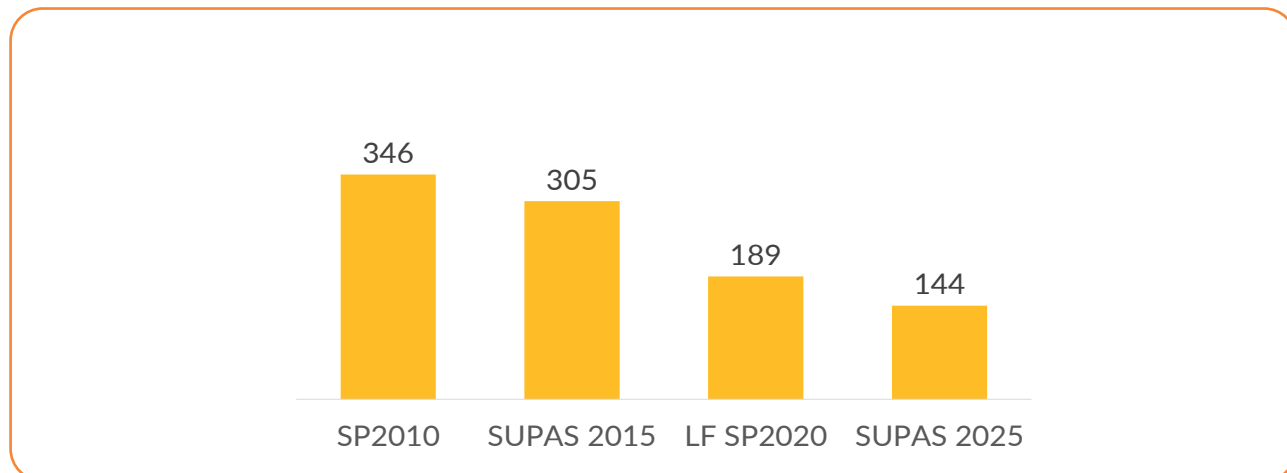
Hasil SUPAS 2025 menunjukkan terjadinya penurunan CMR dari 2,98 menjadi 2,26 terhadap hasil LF SP2020, sedangkan U5MR hasil SUPAS 2025 adalah sebesar 16,38. Jika dibandingkan LF SP2020, U5MR mengalami penurunan sebesar 3,45 poin. U5MR merupakan salah satu indikator paling penting untuk menilai kondisi kesehatan dan kesejahteraan anak di suatu wilayah. Angka NMR, CMR, U5MR menurut provinsi dapat dilihat pada Lampiran 3.



Gambar 14. Angka Kematian Neonatal (NMR), Angka Kematian Anak (CMR) dan Angka Kematian Balita (U5MR) Indonesia, LF SP2020–SUPAS 2025

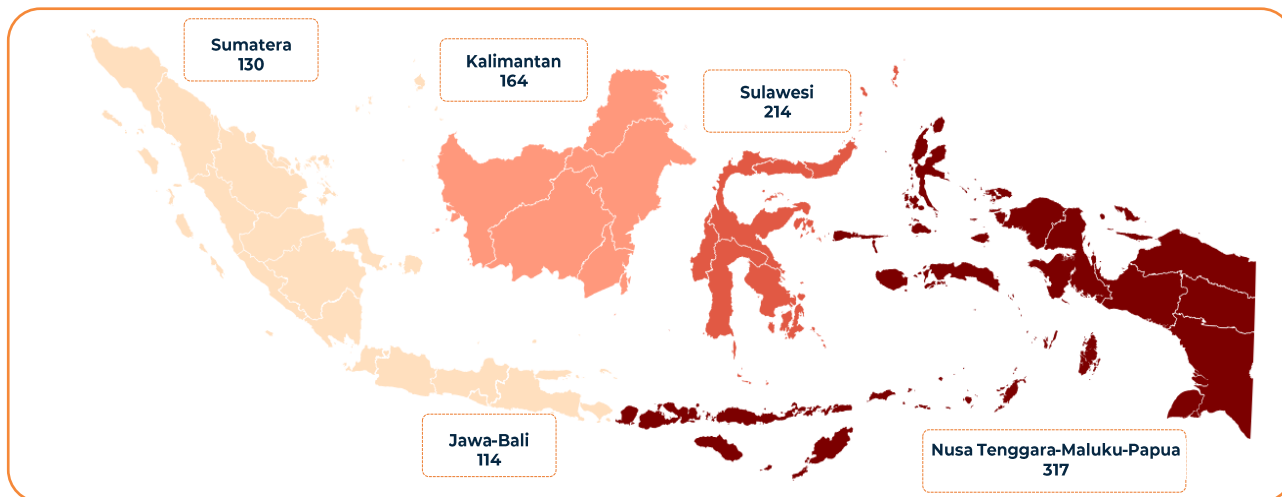
3.3. Angka Kematian Ibu Melahirkan/*Maternal Mortality Ratio (MMR)*

Angka Kematian Ibu melahirkan (MMR) adalah kematian perempuan pada saat hamil, melahirkan atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan. Berdasarkan hasil SUPAS 2025, MMR di Indonesia sebesar 144. Jika dibandingkan dengan hasil LF SP2020, MMR mengalami penurunan sebesar 45 poin dan selama 15 tahun terakhir penurunannya mencapai 202 poin di Indonesia (Gambar 15).



Gambar 15. Angka Kematian Ibu Melahirkan (MMR) Indonesia, SP2010–SUPAS 2025

Berdasarkan wilayah, terdapat disparitas MMR menurut pulau di Indonesia. Hasil SUPAS 2025 menunjukkan bahwa Pulau Jawa-Bali dan Sumatera mencatatkan nilai MMR yang lebih rendah dari nasional, yaitu berturut-turut sebesar 114 dan 130 (Gambar 16). Sedangkan tiga pulau lainnya, memiliki nilai MMR yang lebih tinggi dari nasional yaitu Pulau Kalimantan sebesar 164, Pulau Sulawesi sebesar 214, dan Pulau Nusa Tenggara-Maluku-Papua sebesar 317.



Gambar 16. Angka Kematian Ibu Melahirkan (MMR) Menurut Pulau di Indonesia, Hasil SUPAS 2025

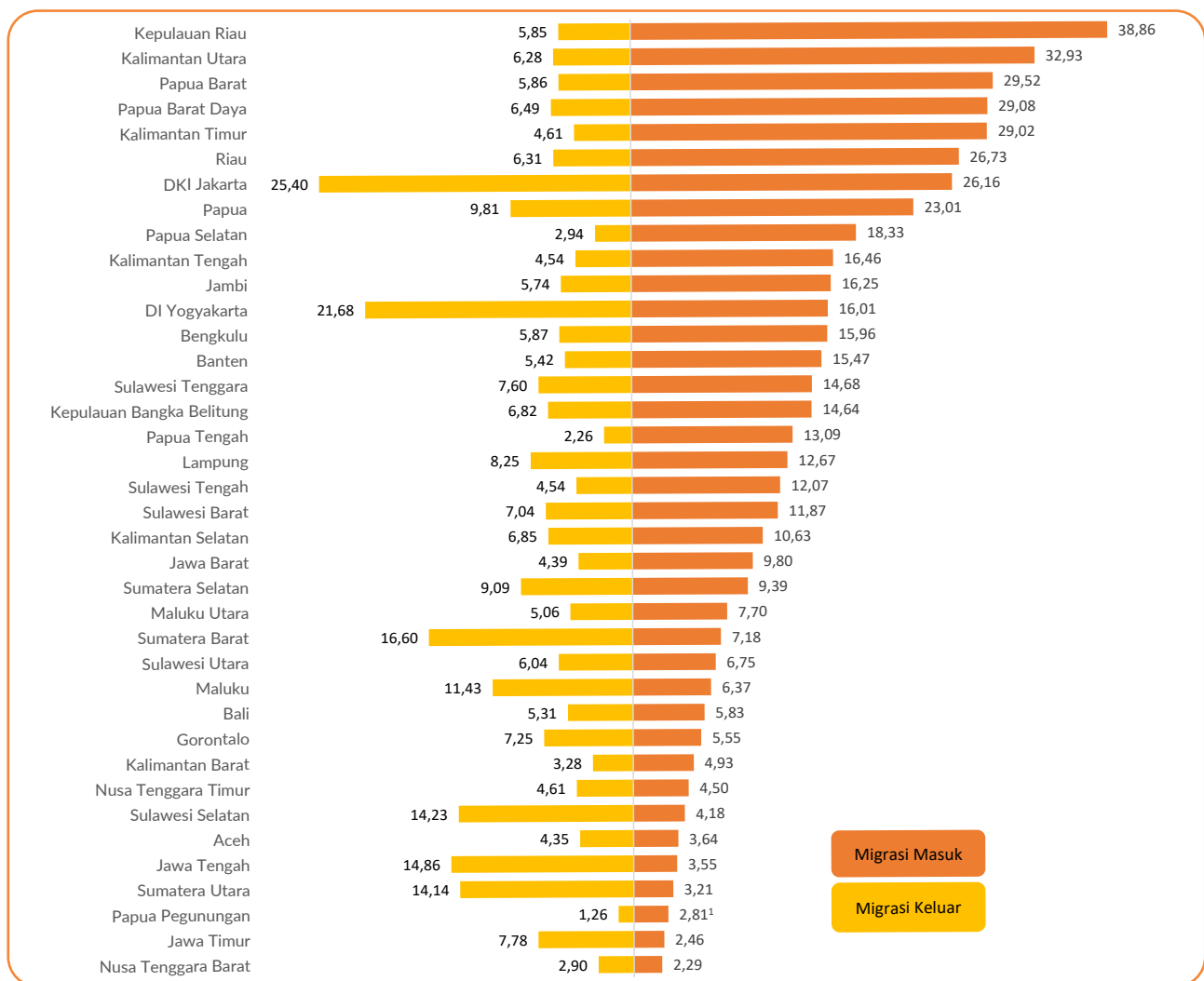
4. Mobilitas Penduduk

4.1. Migrasi Internal

Migrasi seumur hidup didefinisikan sebagai perbedaan antara provinsi tempat tinggal saat survei dan provinsi tempat lahir. Tempat tinggal saat survei dalam SUPAS 2025 mengacu pada tempat biasanya tinggal, bukan semata-mata alamat administrasi, dengan ketentuan telah tinggal selama satu tahun atau lebih, atau kurang dari satu tahun tetapi berniat menetap. Hasil SUPAS 2025 menunjukkan sekitar 9 dari 100 penduduk Indonesia merupakan migran seumur hidup (Lampiran 4).

Perbedaan terlihat jelas antara provinsi tujuan dan provinsi asal migran seumur hidup di Indonesia (Gambar 17). Kepulauan Riau menjadi provinsi dengan persentase migran masuk seumur hidup tertinggi (38,86 persen), diikuti Provinsi Kalimantan Utara (32,93 persen) dan Provinsi Papua Barat (29,52 persen). Pola serupa juga terlihat di Provinsi Papua Barat Daya (29,08 persen) dan Provinsi Kalimantan Timur (29,02 persen).

Beberapa provinsi di Pulau Jawa, Sumatera, dan Sulawesi cenderung menjadi daerah pengirim migran seumur hidup, seperti Provinsi DI Yogyakarta (21,68 persen), Provinsi Sumatera Barat (16,60 persen), Provinsi Jawa Tengah (14,86 persen), dan Provinsi Sulawesi Selatan (14,23 persen). Provinsi DKI Jakarta menunjukkan karakter khusus dengan migran keluar seumur hidup sangat tinggi (25,40 persen) meskipun migran masuk seumur hidupnya juga tinggi (26,16 persen). Sementara itu, provinsi dengan persentase migran masuk seumur hidup relatif rendah antara lain Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat.



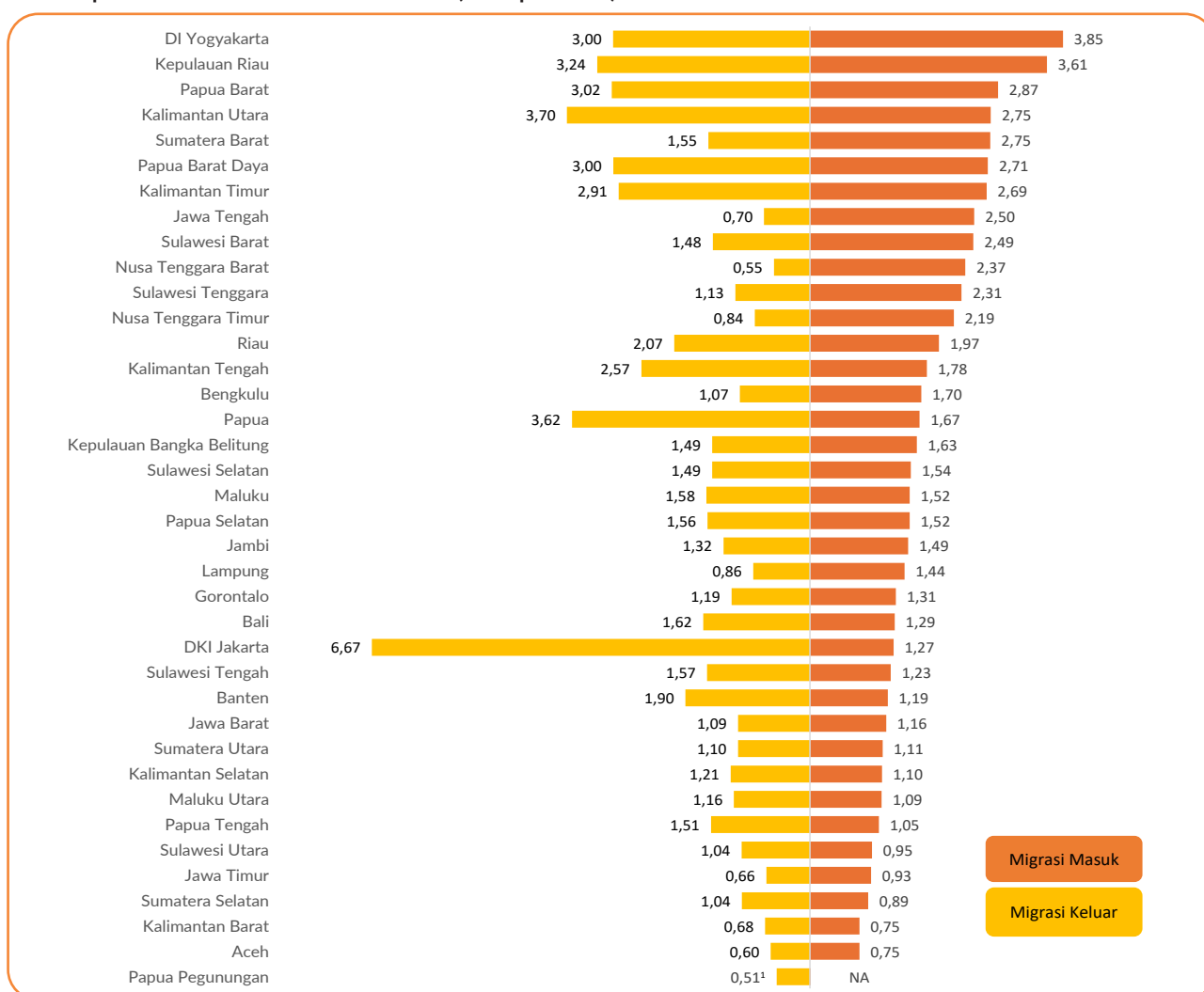
Catatan: ¹Nilai RSE >25% tetapi ≤50%, estimasi harus digunakan dengan hati-hati.

Gambar 17. Persentase Migran Masuk dan Migran Keluar Seumur Hidup Antarprovinsi Menurut Provinsi, Hasil SUPAS 2025

Konsep migrasi risen mengukur perpindahan penduduk dengan membandingkan tempat tinggal saat survei dengan tempat tinggal lima tahun sebelumnya. Indikator ini menghitung besarnya migrasi dengan mengacu pada jumlah penduduk berusia lima tahun ke atas yang bertempat tinggal di provinsi yang berbeda dibandingkan dengan lima tahun sebelumnya. Hasil SUPAS 2025 menunjukkan bahwa 15 dari 1.000 penduduk Indonesia usia 5 tahun ke atas merupakan migran risen antarprovinsi (Lampiran 5).

Gambar 18 menunjukkan dinamika perpindahan penduduk antarprovinsi dalam lima tahun terakhir. DI Yogyakarta tercatat sebagai provinsi dengan persentase migrasi masuk risen terbesar, yaitu sebesar 3,85 persen, sementara migrasi keluar risen tercatat sebesar 3,00 persen. Kepulauan Riau juga mencatat persentase migrasi masuk risen yang relatif tinggi, yaitu sebesar 3,61 persen, dengan migrasi keluar risen sebesar 3,24 persen. Namun demikian, jika dilihat dari selisih antara migrasi masuk dan keluar, beberapa provinsi menunjukkan migrasi neto risen positif yang cukup besar, terutama Nusa Tenggara Barat, dengan migrasi masuk risen sebesar 2,37 persen dan migrasi keluar risen sebesar 0,55 persen; Jawa Tengah sebesar 2,50 persen dan 0,70 persen; serta Nusa Tenggara Timur sebesar 2,19 persen dan 0,84 persen. Pola ini mengindikasikan meningkatnya daya tarik wilayah-wilayah tersebut sebagai tujuan migrasi risen.

Sebaliknya, DKI Jakarta mencatat migrasi neto risen negatif terbesar, yaitu sebesar -5,40 persen. Nilai ini ditandai oleh persentase migrasi keluar risen yang jauh lebih tinggi, yaitu sebesar 6,67 persen, dibandingkan migrasi masuk risen yang hanya sebesar 1,27 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir jumlah penduduk yang keluar dari DKI Jakarta lebih besar dibandingkan dengan penduduk yang masuk, sehingga memperkuat peran DKI Jakarta sebagai daerah pengirim migran. Pola serupa, meskipun dengan intensitas yang lebih rendah, juga terlihat di Papua, dengan migrasi masuk risen sebesar 1,67 persen dan migrasi keluar risen sebesar 3,62 persen; serta Kalimantan Tengah, dengan migrasi masuk risen sebesar 1,78 persen dan migrasi keluar risen sebesar 2,57 persen. Sebaliknya, Nusa Tenggara Barat mencatat migrasi neto risen positif terbesar, yaitu sebesar 1,82 persen, yang mengindikasikan perannya sebagai salah satu daerah tujuan migrasi risen dalam periode lima tahun terakhir (Lampiran 5).

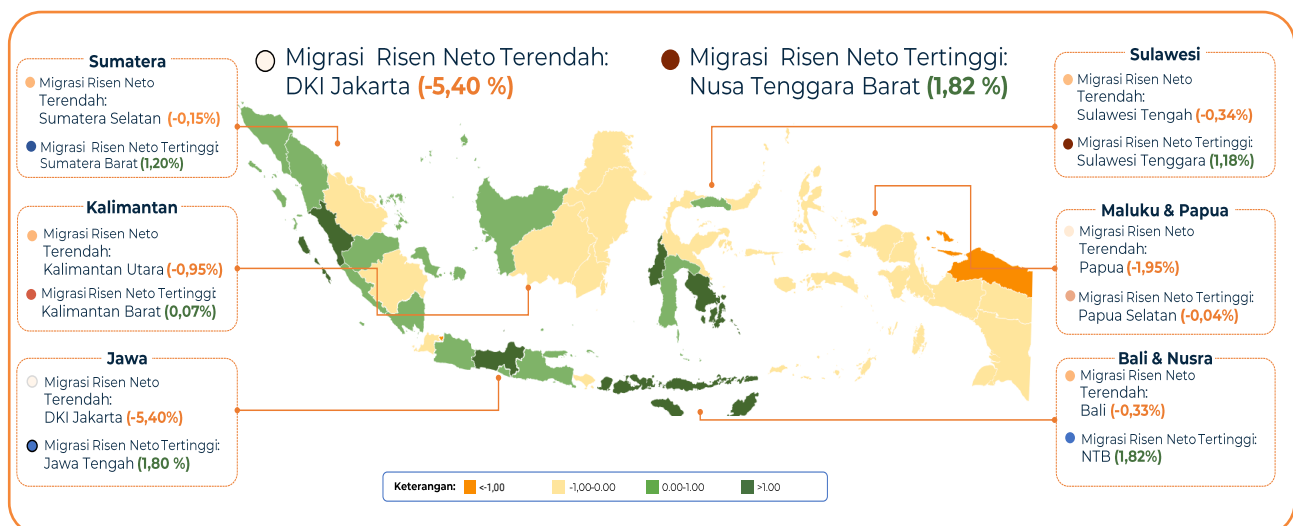


Catatan: ¹Nilai RSE >25% tetapi ≤50%, estimasi harus digunakan dengan hati-hati.
NA: Angka tidak dapat ditampilkan (RSE>50%)

Gambar 18. Persentase Migran Masuk dan Migran Keluar Risen Antarprovinsi Menurut Provinsi, Hasil SUPAS 2025

Dilihat menurut kelompok pulau, pola migrasi neto risen menunjukkan variasi yang cukup besar antarpulau (Gambar 19). Untuk wilayah Sumatera, migrasi neto risen negatif terbesar tercatat di Sumatera Selatan (-0,15 persen), sedangkan migrasi neto risen positif terbesar tercatat di Sumatera Barat (1,20 persen). Pada wilayah Kalimantan, Kalimantan Utara mencatat migrasi neto risen negatif terbesar sebesar -0,95 persen, sementara Kalimantan Barat mencatat migrasi neto risen positif terbesar, meskipun relatif kecil, yaitu sebesar 0,07 persen. Sementara itu, untuk wilayah Jawa, migrasi neto risen negatif terbesar tercatat di DKI Jakarta (-5,40 persen), sedangkan migrasi neto risen positif terbesar tercatat di Jawa Tengah (1,80 persen).

Di Pulau Sulawesi, migrasi neto risen negatif terbesar tercatat di Sulawesi Tengah, yaitu sebesar -0,34 persen, sedangkan migrasi neto risen positif terbesar tercatat di Sulawesi Tenggara, yaitu sebesar 1,18 persen. Untuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara, Bali mencatat migrasi neto risen negatif terbesar sebesar -0,33 persen, sementara Nusa Tenggara Barat mencatat migrasi neto risen positif terbesar sebesar 1,82 persen. Adapun di wilayah Maluku dan Papua, seluruh provinsi mencatat migrasi neto risen bernilai negatif dengan besaran yang relatif kecil. Papua mencatat migrasi neto risen negatif terbesar, yaitu sebesar -1,95 persen, sedangkan Papua Selatan mencatat nilai yang paling mendekati nol, yaitu sebesar -0,04 persen, meskipun masih berada pada kategori negatif.

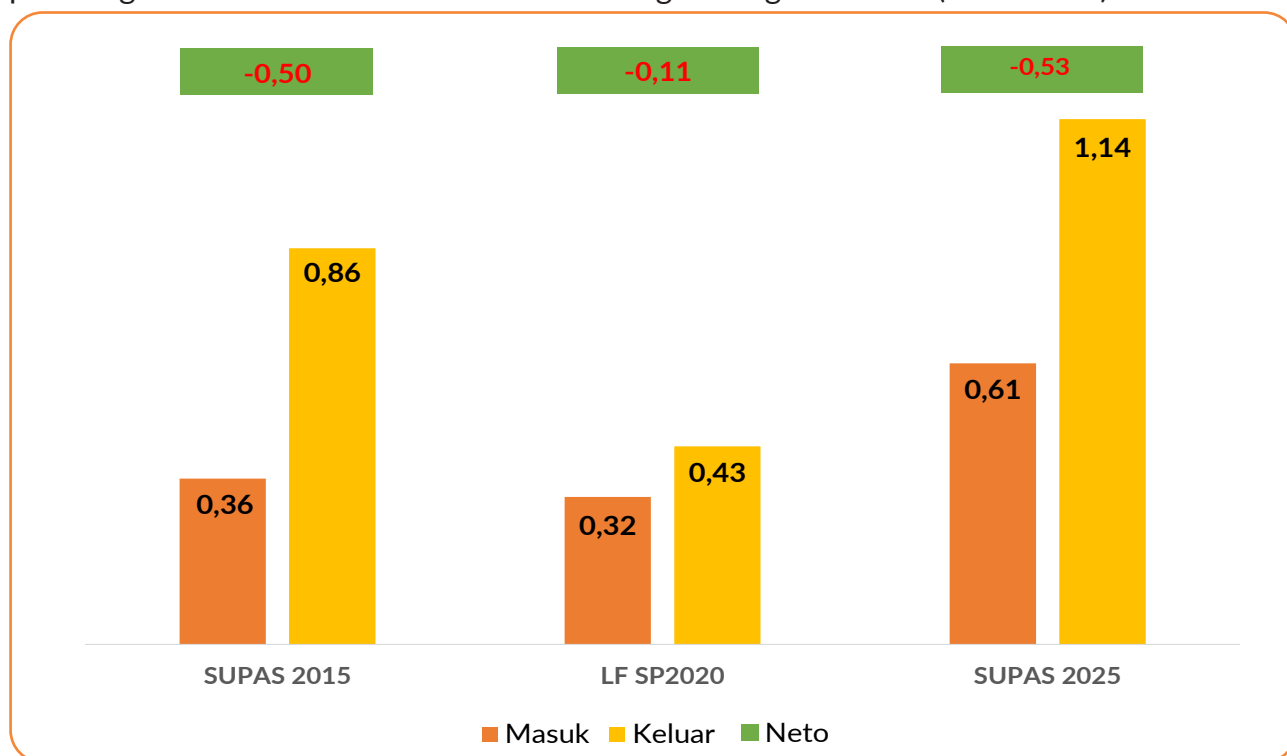


Gambar 19. Persentase Migran Neto Risen Antarprovinsi Menurut Provinsi, Hasil SUPAS 2025

4.2. Migrasi Internasional

SUPAS 2025 mencatat arus migrasi internasional ke dan dari Indonesia selama periode 2022–2025. Migrasi internasional dalam konteks ini diartikan sebagai perpindahan penduduk antarnegara untuk tinggal atau menetap di negara tujuan sekurang-kurangnya selama satu tahun, atau kurang dari satu tahun dengan niat menetap. Hasil SUPAS 2025 menunjukkan bahwa angka migrasi masuk internasional tercatat sebesar 0,61 (rata-rata 61 orang masuk ke Indonesia per 100.000 penduduk tiap tahun) atau mencapai 537 ribu migran internasional yang masuk ke Indonesia pada periode 2022–2025. Pada periode yang sama, angka migrasi keluar internasional adalah sebesar 1,14 (rata-rata 114 orang keluar dari Indonesia per 100.000 penduduk tiap tahun) atau sebanyak satu juta orang migran keluar dari Indonesia.

Angka migrasi keluar internasional yang lebih besar dari migrasi masuk menunjukkan bahwa pada periode 2022–2025 lebih banyak penduduk Indonesia yang berpindah ke luar negeri. Angka migrasi neto internasional tercatat sebesar –0,53. Hal tersebut berarti ada pengurangan rata-rata 53 orang setiap 100.000 penduduk Indonesia setiap tahunnya karena migrasi internasional. Jika dibandingkan dengan hasil LF SP2020, baik angka migrasi masuk maupun keluar internasional pada SUPAS 2025 mengalami peningkatan, namun kenaikan pada migrasi keluar relatif lebih besar dibandingkan migrasi masuk (Gambar 20).



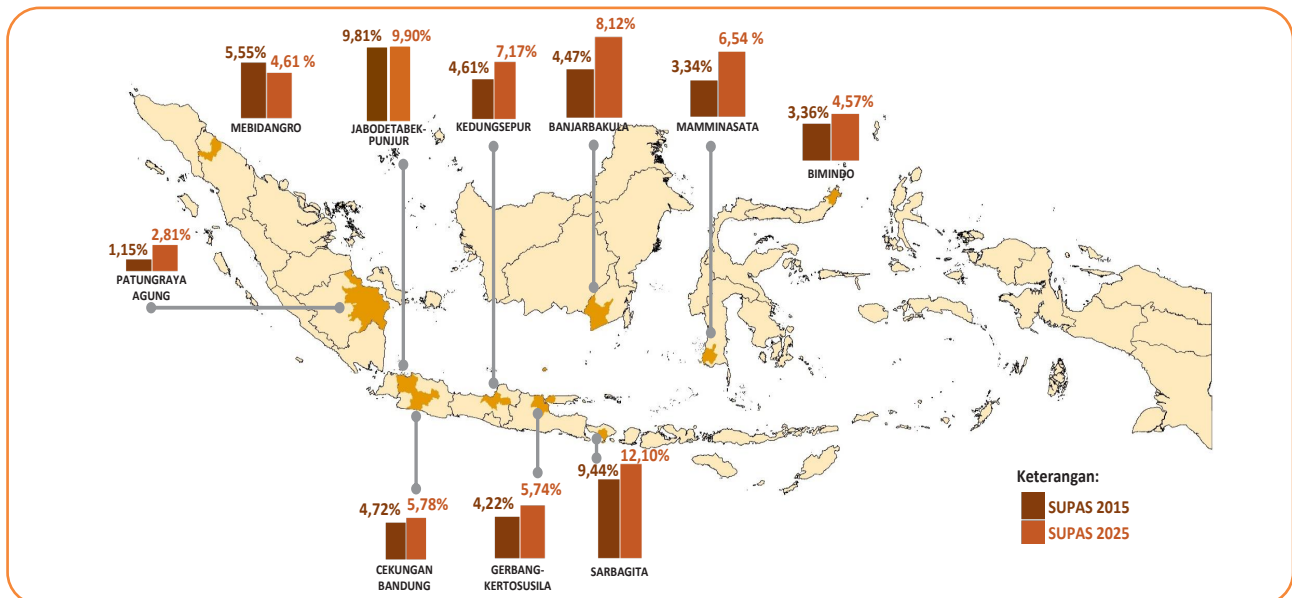
Gambar 20. Angka Migrasi Internasional Indonesia, Hasil SUPAS 2015, LF SP2020 dan SUPAS 2025

4.3. Komuter

Peningkatan variasi moda dan kemudahan akses transportasi mendorong mobilitas penduduk, khususnya komuter. Definisi komuter adalah penduduk berusia 5 tahun ke atas yang bekerja/bersekolah/kuliah/kursus/lainnya di luar wilayah kabupaten/kota tempat tinggalnya dan melakukan perjalanan pergi-pulang secara rutin pada hari yang sama. Berdasarkan hasil SUPAS 2025, sekitar 8 dari 100 penduduk usia 5 tahun ke atas di wilayah metropolitan Indonesia merupakan komuter. Pola ini mencerminkan kuatnya keterkaitan fungsional antarwilayah, terutama di sekitar wilayah metropolitan. Aktivitas komuter paling banyak terjadi di wilayah metropolitan, yang terdiri atas kota inti dan wilayah penyangganya yang saling terhubung secara fungsional. Aktivitas ini memegang peranan kunci dalam mendorong pemerataan ekonomi dan meningkatkan daya saing antardaerah.

Persentase komuter tertinggi terdapat di Wilayah Metropolitan (WM) Sarbagita (Denpasar) yang mencapai 12,10 persen pada SUPAS 2025, meningkat dari 9,44 persen pada SUPAS 2015 (Gambar 21). Peningkatan komuter juga cukup signifikan terjadi di beberapa wilayah metropolitan lainnya, seperti WM Banjarkakula (Banjarmasin) yang naik dari 4,47 persen pada 2015 menjadi 8,12 persen pada 2025, atau meningkat sekitar 3,65 persen poin, yang merupakan peningkatan tertinggi dibandingkan wilayah metropolitan lainnya jika dibandingkan dengan hasil SUPAS 2015. Selain itu, WM Mamminasata (Makassar) mengalami peningkatan dari 3,34 persen menjadi 6,54 persen, WM Kedungsepur (Semarang) meningkat dari 4,61 persen menjadi 7,17 persen serta WM Cekungan Bandung yang meningkat dari 4,72 persen menjadi 5,78 persen. Peningkatan terendah terjadi di WM Jabodetabekpunjur, dari 9,81 persen menjadi 9,90 persen.

Sebaliknya, terdapat pula wilayah yang mengalami penurunan persentase komuter. WM Mebidangro (Medan) mencatat penurunan terbesar, dari 5,55 persen pada 2015 menjadi 4,61 persen pada 2025, atau turun sekitar 0,94 persen poin. Penurunan ini mengindikasikan adanya perubahan pola hunian, aktivitas kerja, atau peningkatan ketersediaan kesempatan kerja di dalam wilayah administrasi yang sama.



Gambar 21. Persentase Komuter di 10 Wilayah Metropolitan di Indonesia, Hasil SUPAS 2015 dan SUPAS 2025

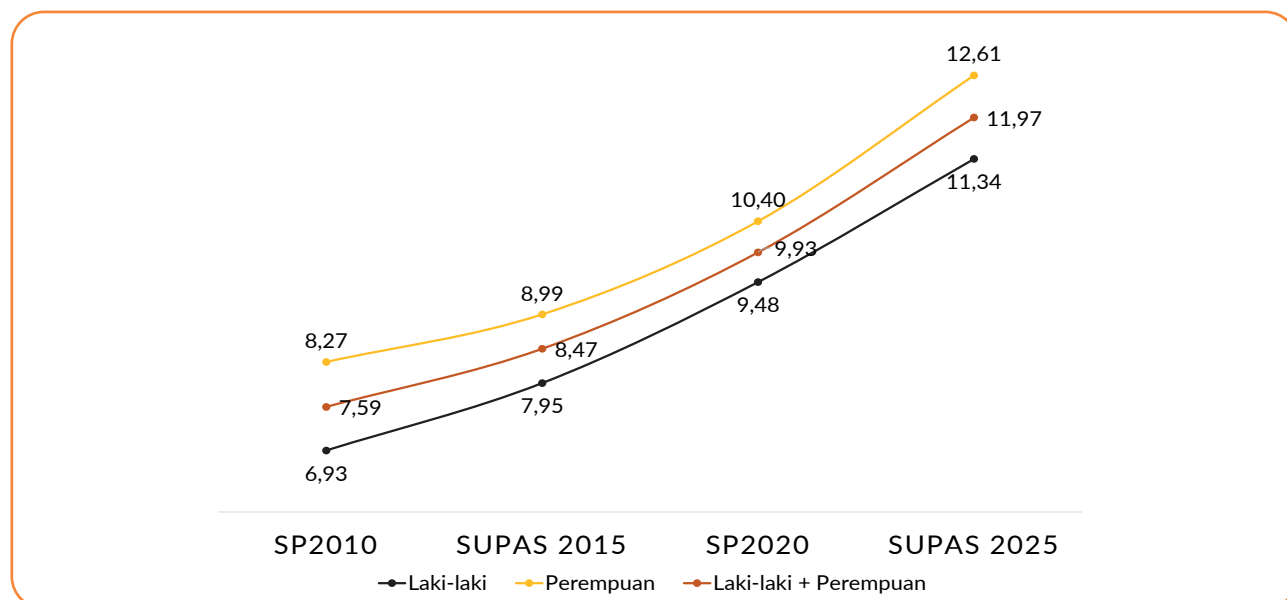
Catatan:

1. **Mebidangro** mencakup Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Karo.
2. **Patunggraya Agung** mencakup Kota Palembang, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Ilir, dan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. **Jabodetabekpunjur** mencakup Provinsi DKI Jakarta, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kabupaten Cianjur.
4. **Cekungan Bandung** mencakup Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang
5. **Gerbangkertosusila** mencakup Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Lamongan.
6. **Kedungsepur** mencakup Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kota Semarang, dan Kabupaten Grobogan.
7. **Sarbagita** mencakup Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Tabanan.
8. **Banjarkakula** mencakup Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, dan Kabupaten Tanah Laut.
9. **Bimindo** mencakup Kota Bitung, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Utara, Kota Tomohon, dan Kota Manado.
10. **Mamminasata** mencakup Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa, dan Kabupaten Takalar.

5. Penduduk Lanjut Usia

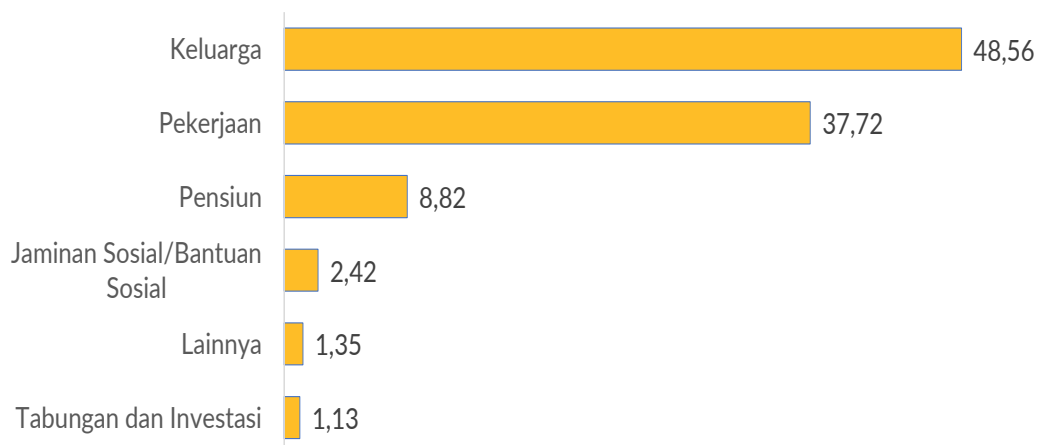
Indonesia memasuki fase *ageing population* ditunjukkan dengan proporsi penduduk berusia 60 tahun ke atas mencapai lebih dari 10 persen. Hasil SUPAS 2025 mempertegas adanya penuaan penduduk di Indonesia. Persentase Penduduk Lanjut Usia (lansia) terus meningkat dari 7,59 persen pada 2010, menjadi 8,47 persen pada 2015, dan tetap meningkat pada tahun 2020 menjadi 9,93 persen. Pada 2025, persentase penduduk lansia mencapai 11,97 persen, terdiri atas 12,61 persen lansia perempuan dan 11,34 persen lansia laki-laki. Penuaan penduduk juga membawa implikasi penting bagi penyediaan layanan sosial, kesehatan, dan sistem perlindungan yang lebih responsif terhadap kebutuhan lansia.

Dinamika penuaan penduduk menunjukkan variasi yang cukup besar antarwilayah. Berdasarkan SUPAS 2025, DI Yogyakarta memiliki persentase penduduk lansia tertinggi, yaitu 17,83 persen, diikuti oleh Jawa Timur (15,45 persen), dan Bali (15,07 persen). Sebaliknya, persentase penduduk lansia terendah terdapat di Papua Tengah (6,71 persen), Papua Barat (6,77 persen), dan Papua Selatan (6,81 persen) (Lampiran 6).



Gambar 22. Persentase Penduduk Usia Lanjut (60 Tahun ke Atas) Indonesia, Hasil SUPAS 2025

SUPAS 2025 juga memberikan gambaran mengenai sumber utama perolehan uang/ barang penduduk lansia. Sebagian besar lansia memperoleh uang atau barang dari keluarga (suami/istri, anak/menantu, saudara/famili lain) dengan proporsi sebesar 48,56 persen. Sumber utama perolehan uang/barang berikutnya adalah dari pekerjaan dengan kontribusi 37,72 persen. Selain itu, lansia mengandalkan uang pensiun (8,82 persen), jaminan sosial atau bantuan sosial (2,42 persen), dan lainnya (1,35 persen). Sementara itu, kontribusi dari tabungan dan investasi tercatat paling rendah, yakni 1,13 persen.

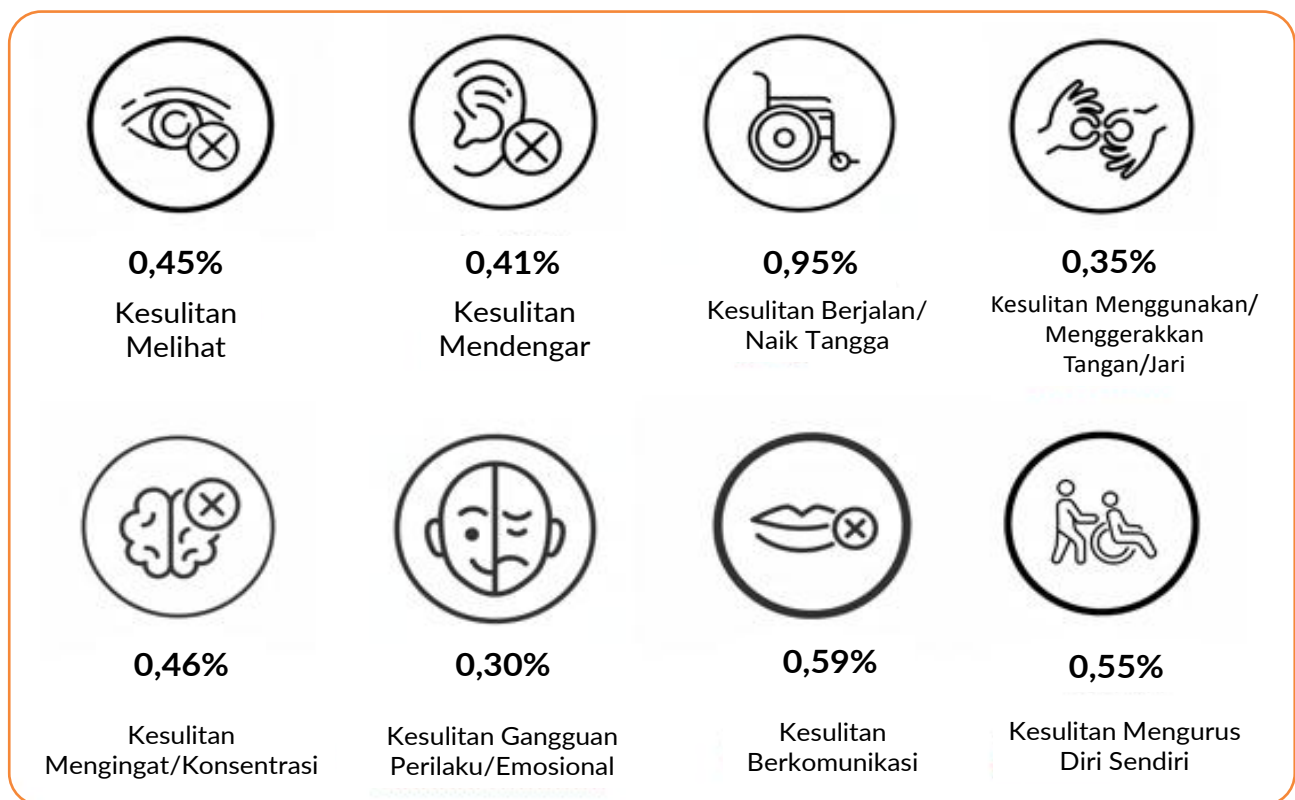


Gambar 23. Persentase Lansia Menurut Sumber Utama Perolehan Uang/Barang Indonesia, Hasil SUPAS 2025

6. Disabilitas Penduduk

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak (Undang-Undang No. 8 Tahun 2016). Disabilitas yang dicakup adalah individu yang mengalami “banyak kesulitan/gangguan/keterbatasan” atau “sama sekali tidak dapat beraktivitas”. Hasil SUPAS 2025 menunjukkan bahwa prevalensi penduduk penyandang disabilitas umur 5 tahun ke atas di Indonesia mencapai 2,17 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan hasil LF SP2020 yang mencatat prevalensi disabilitas sebesar 1,43 persen.

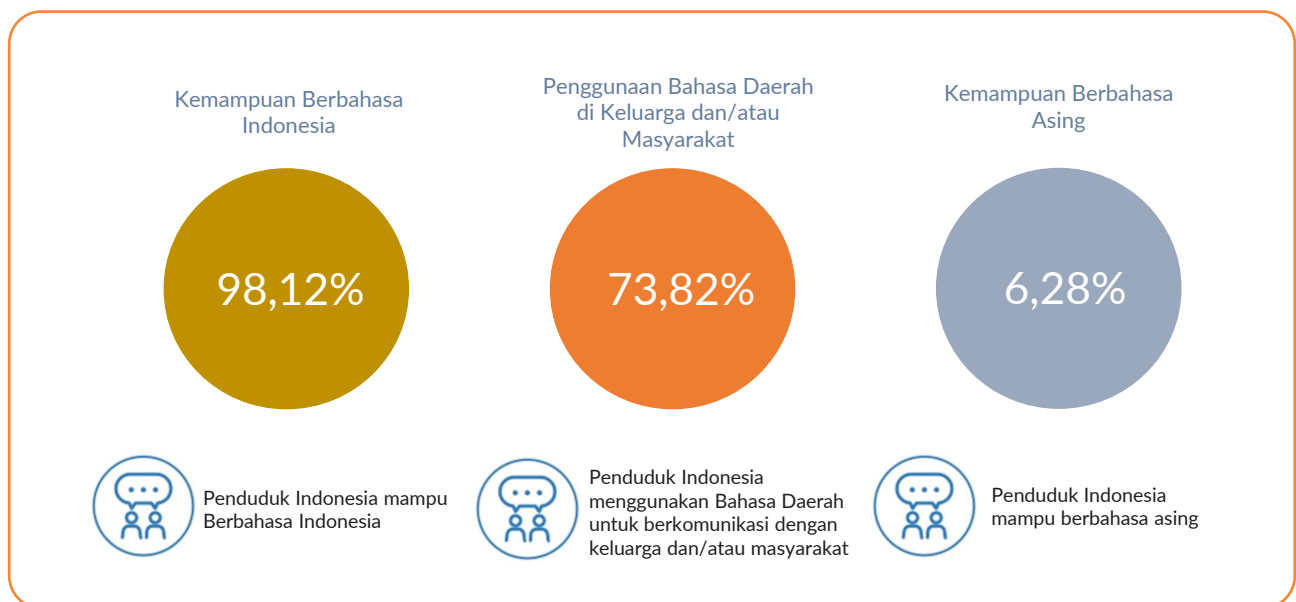
Penyandang disabilitas pada SUPAS2025 terbagi menjadi delapan jenis: kesulitan melihat, kesulitan mendengar, kesulitan berjalan/naik tangga, kesulitan menggunakan/menggerakkan tangan/jari, kesulitan mengingat/konsentrasi, kesulitan gangguan perilaku/emosional, kesulitan berkomunikasi dan kesulitan mengurus diri sendiri. Hasil SUPAS 2025 mencatat persentase penduduk penyandang disabilitas tertinggi pada kesulitan berjalan/naik tangga sebesar 0,95 persen dan penyandang disabilitas terendah kesulitan gangguan perilaku/emosional sebesar 0,30 persen.



Gambar 24. Gambaran Penyandang Disabilitas Umur 5 Tahun Ke Atas (persen) Indonesia, Hasil SUPAS 2025

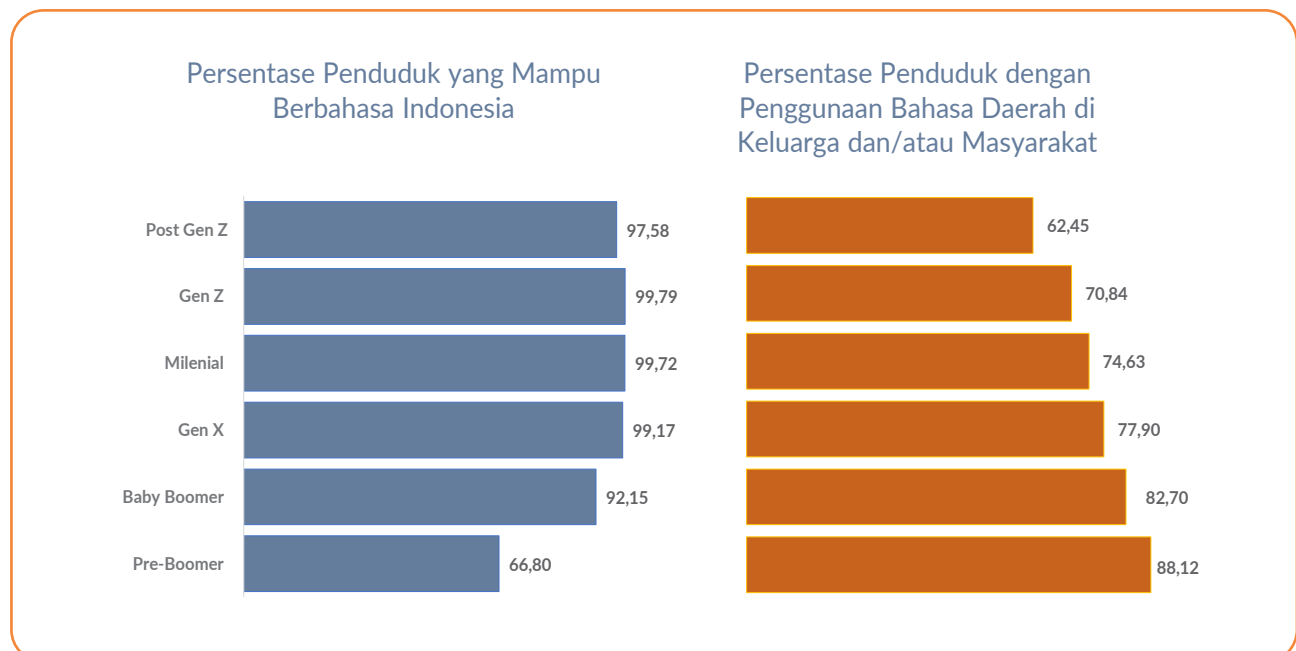
7. Bahasa

Indonesia memiliki satu bahasa nasional, yaitu Bahasa Indonesia, serta beragam bahasa daerah yang digunakan di berbagai wilayah. SUPAS 2025 mengumpulkan informasi mengenai kemampuan berbahasa Indonesia, penggunaan bahasa daerah, dan kemampuan berbahasa asing pada penduduk Indonesia berumur 5 tahun ke atas. Hasil SUPAS 2025 menunjukkan bahwa 98,12 persen penduduk Indonesia mampu berbahasa Indonesia dan sebanyak 73,82 persen menggunakan bahasa daerah dalam komunikasi sehari-hari dengan keluarga dan/atau masyarakat. Selain itu, sebesar 6,28 persen penduduk Indonesia memiliki kemampuan berbahasa asing.



Gambar 25. Kemampuan Berbahasa Indonesia, Penggunaan Bahasa Daerah di Keluarga dan/atau Masyarakat dan Kemampuan Berbahasa Asing (persen) pada Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas Indonesia, Hasil SUPAS 2025

Jika dilihat menurut generasi, kemampuan berbahasa Indonesia paling rendah terdapat pada generasi Pre-Boomer, yaitu sebesar 66,80 persen, sedangkan yang tertinggi pada Gen Z sebesar 99,79 persen. Sebaliknya, dalam penggunaan bahasa daerah di lingkungan keluarga dan/atau masyarakat, Post Gen Z memiliki persentase terendah sebesar 62,45 persen, sementara generasi Pre-Boomer memiliki persentase tertinggi sebesar 88,12 persen.



Gambar 26. Kemampuan Berbahasa Indonesia dan Penggunaan Bahasa Daerah di Keluarga dan/atau Masyarakat (persen) pada Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Generasi Indonesia, Hasil SUPAS 2025



LAMPIRAN



Lampiran 1. Rasio Jenis Kelamin dan Rasio Ketergantungan Menurut Provinsi di Indonesia, Hasil SUPAS 2025

Provinsi	Rasio Jenis Kelamin	Rasio Ketergantungan
(1)	(2)	(3)
Aceh	101	47,75
Sumatera Utara	101	48,76
Sumatera Barat	102	47,59
Riau	104	45,58
Jambi	103	45,24
Sumatera Selatan	104	47,21
Bengkulu	104	45,46
Lampung	104	46,79
Kepulauan Bangka Belitung	105	43,15
Kepulauan Riau	103	43,64
DKI Jakarta	100	40,34
Jawa Barat	102	43,38
Jawa Tengah	101	44,96
DI Yogyakarta	98	46,41
Jawa Timur	99	44,35
Banten	103	42,60
Bali	100	43,82
Nusa Tenggara Barat	101	48,77
Nusa Tenggara Timur	100	54,92
Kalimantan Barat	105	44,93
Kalimantan Tengah	106	42,62
Kalimantan Selatan	102	47,17
Kalimantan Timur	107	40,19
Kalimantan Utara	110	41,80
Sulawesi Utara	104	45,95
Sulawesi Tengah	105	46,60
Sulawesi Selatan	99	44,87
Sulawesi Tenggara	103	48,75
Gorontalo	102	43,89
Sulawesi Barat	103	49,12
Maluku	102	45,76
Maluku Utara	105	46,21
Papua Barat	110	43,02
Papua Barat Daya	108	43,16
Papua	109	58,83
Papua Selatan	108	75,40
Papua Tengah	114	41,79
Papua Pegunungan	114	35,83
Indonesia	102	45,05

Lampiran 2. Angka Kelahiran Kasar (CBR), Angka Kelahiran Total (TFR), Angka Kelahiran (ASFR) 15–19 Tahun Menurut Provinsi di Indonesia, Hasil SUPAS 2025

Provinsi	Angka Kelahiran Kasar (CBR)	Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka Kelahiran (ASFR) 15-19 Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	18,56	2,36	6,85
Sumatera Utara	18,62	2,41	11,27
Sumatera Barat	18,23	2,39	10,36
Riau	17,42	2,21	11,08
Jambi	17,39	2,23	18,49
Sumatera Selatan	16,47	2,18	19,24
Bengkulu	17,58	2,27	24,53
Lampung	16,84	2,23	15,31
Kepulauan Bangka Belitung	17,21	2,20	25,31
Kepulauan Riau	17,57	2,17	11,18
DKI Jakarta	13,61	1,79	6,68
Jawa Barat	15,79	2,05	14,54
Jawa Tengah	14,95	2,05	15,01
DI Yogyakarta	12,98	1,84	9,37
Jawa Timur	13,96	1,95	15,98
Banten	15,50	1,96	9,90
Bali	14,67	2,02	16,70
Nusa Tenggara Barat	18,21	2,38	28,43
Nusa Tenggara Timur	20,85	2,72	21,86
Kalimantan Barat	17,67	2,25	28,77
Kalimantan Tengah	18,06	2,25	25,60
Kalimantan Selatan	16,94	2,26	19,80
Kalimantan Timur	17,52	2,09	34,19
Kalimantan Utara	18,06	2,28	19,00
Sulawesi Utara	15,00	2,07	33,97
Sulawesi Tengah	17,39	2,25	33,80
Sulawesi Selatan	17,18	2,17	20,00
Sulawesi Tenggara	19,66	2,48	21,71
Gorontalo	18,09	2,24	35,92
Sulawesi Barat	19,95	2,50	36,22
Maluku	19,86	2,44	16,96
Maluku Utara	18,48	2,38	32,44
Papua Barat	21,39	2,62	24,46
Papua Barat Daya	21,16	2,58	24,30
Papua	18,32	2,57	26,60
Papua Selatan	17,60	2,74	35,26
Papua Tengah	20,33	2,64	39,38
Papua Pegunungan	22,26	2,78	33,89
Indonesia	16,18	2,13	16,99

Lampiran 3. Angka Kematian Kasar (CDR), Angka Kematian Bayi (IMR), Angka Kematian Anak (CMR), dan Angka Kematian Balita (U5MR) Menurut Provinsi di Indonesia, Hasil SUPAS 2025

Provinsi	Angka Kematian Kasar (CDR)	Angka Kematian Bayi (IMR)	Angka Kematian Anak (CMR)	Angka Kematian Balita (U5MR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	5,69	16,27	2,68	18,94
Sumatera Utara	5,66	15,88	2,63	18,51
Sumatera Barat	6,65	14,58	2,35	16,93
Riau	4,58	13,28	2,13	15,41
Jambi	5,45	14,75	2,44	17,19
Sumatera Selatan	5,84	14,66	2,41	17,07
Bengkulu	5,88	16,89	2,91	19,80
Lampung	6,28	13,53	2,20	15,73
Kepulauan Bangka Belitung	5,56	14,53	2,36	16,89
Kepulauan Riau	4,50	11,89	1,89	13,79
DKI Jakarta	5,31	9,26	1,47	10,73
Jawa Barat	5,99	12,84	2,04	14,87
Jawa Tengah	7,25	10,88	1,72	12,60
DI Yogyakarta	9,22	9,80	1,55	11,36
Jawa Timur	7,88	11,84	1,87	13,71
Banten	4,89	12,94	2,19	15,13
Bali	7,87	11,51	1,84	13,35
Nusa Tenggara Barat	6,15	21,03	3,83	24,85
Nusa Tenggara Timur	6,64	22,21	4,07	26,29
Kalimantan Barat	5,56	14,83	2,44	17,27
Kalimantan Tengah	5,48	16,21	2,91	19,12
Kalimantan Selatan	5,47	14,70	2,45	17,15
Kalimantan Timur	5,01	13,47	2,16	15,62
Kalimantan Utara	5,03	14,76	2,39	17,15
Sulawesi Utara	7,81	15,75	2,56	18,32
Sulawesi Tengah	6,53	23,99	4,68	28,67
Sulawesi Selatan	6,81	15,76	2,61	18,37
Sulawesi Tenggara	5,72	19,53	3,39	22,92
Gorontalo	7,14	26,12	5,20	31,31
Sulawesi Barat	6,32	25,70	5,19	30,89
Maluku	6,78	25,66	5,04	30,71
Maluku Utara	5,87	24,45	4,82	29,27
Papua Barat	5,86	33,58	8,55	42,14
Papua Barat Daya	5,87	27,20	9,59	36,78
Papua	5,81	27,07	5,60	32,67
Papua Selatan	5,93	34,49	10,37	44,86
Papua Tengah	6,00	34,32	8,88	43,20
Papua Pegunungan	6,96	37,04	9,76	46,80
Indonesia	6,45	14,12	2,26	16,38

Lampiran 4. Persentase Migran Seumur Hidup Antarprovinsi Menurut Provinsi, Hasil SUPAS 2025

Provinsi	Persentase Migran Seumur Hidup	
	Migran Masuk	Migran Keluar
(1)	(2)	(3)
Aceh	3,64	4,35
Sumatera Utara	3,21	14,14
Sumatera Barat	7,18	16,60
Riau	26,73	6,31
Jambi	16,25	5,74
Sumatera Selatan	9,39	9,09
Bengkulu	15,96	5,87
Lampung	12,67	8,25
Kepulauan Bangka Belitung	14,64	6,82
Kepulauan Riau	38,86	5,85
DKI Jakarta	26,16	25,40
Jawa Barat	9,80	4,39
Jawa Tengah	3,55	14,86
DI Yogyakarta	16,01	21,68
Jawa Timur	2,46	7,78
Banten	15,47	5,42
Bali	5,83	5,31
Nusa Tenggara Barat	2,29	2,90
Nusa Tenggara Timur	4,50	4,61
Kalimantan Barat	4,93	3,28
Kalimantan Tengah	16,46	4,54
Kalimantan Selatan	10,63	6,85
Kalimantan Timur	29,02	4,61
Kalimantan Utara	32,93	6,28
Sulawesi Utara	6,75	6,04
Sulawesi Tengah	12,07	4,54
Sulawesi Selatan	4,18	14,23
Sulawesi Tenggara	14,68	7,60
Gorontalo	5,55	7,25
Sulawesi Barat	11,87	7,04
Maluku	6,37	11,43
Maluku Utara	7,70	5,06
Papua Barat	29,52	5,86
Papua Barat Daya	29,08	6,49
Papua	23,01	9,81
Papua Selatan	18,33	2,94
Papua Tengah	13,09	2,26
Papua Pegunungan	2,81 ¹	1,26
Indonesia	9,09	-

Catatan: ¹Nilai RSE >25% tetapi ≤50%, estimasi harus digunakan dengan hati-hati.

Lampiran 5. Persentase Migran Risen Antarprovinsi Menurut Provinsi, Hasil SUPAS 2025

Provinsi	Persentase Migran Risen		
	Migran Masuk	Migran Keluar	Migran Neto
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	0,75	0,60	0,16
Sumatera Utara	1,11	1,10	0,01
Sumatera Barat	2,75	1,55	1,20
Riau	1,97	2,07	-0,10
Jambi	1,49	1,32	0,18
Sumatera Selatan	0,89	1,04	-0,15
Bengkulu	1,70	1,07	0,63
Lampung	1,44	0,86	0,58
Kepulauan Bangka Belitung	1,63	1,49	0,14
Kepulauan Riau	3,61	3,24	0,37
DKI Jakarta	1,27	6,67	-5,40
Jawa Barat	1,16	1,09	0,07
Jawa Tengah	2,50	0,70	1,80
DI Yogyakarta	3,85	3,00	0,85
Jawa Timur	0,93	0,66	0,27
Banten	1,19	1,90	-0,71
Bali	1,29	1,62	-0,33
Nusa Tenggara Barat	2,37	0,55	1,82
Nusa Tenggara Timur	2,19	0,84	1,35
Kalimantan Barat	0,75	0,68	0,07
Kalimantan Tengah	1,78	2,57	-0,79
Kalimantan Selatan	1,10	1,21	-0,11
Kalimantan Timur	2,69	2,91	-0,22
Kalimantan Utara	2,75	3,70	-0,95
Sulawesi Utara	0,95	1,04	-0,10
Sulawesi Tengah	1,23	1,57	-0,34
Sulawesi Selatan	1,54	1,49	0,05
Sulawesi Tenggara	2,31	1,13	1,18
Gorontalo	1,31	1,19	0,11
Sulawesi Barat	2,49	1,48	1,01
Maluku	1,52	1,58	-0,06
Maluku Utara	1,09	1,16	-0,07
Papua Barat	2,87	3,02	-0,15
Papua Barat Daya	2,71	3,00	-0,29
Papua	1,67	3,62	-1,95
Papua Selatan	1,52	1,56	-0,04
Papua Tengah	1,05	1,51	-0,46
Papua Pegunungan	NA	0,51 ¹	NA
Indonesia	1,53	-	-

Catatan: ¹Nilai RSE >25% tetapi ≤50%, estimasi harus digunakan dengan hati-hati.

NA: Angka tidak dapat ditampilkan (RSE>50%)

Lampiran 6. Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi di Indonesia, Hasil SUPAS 2025

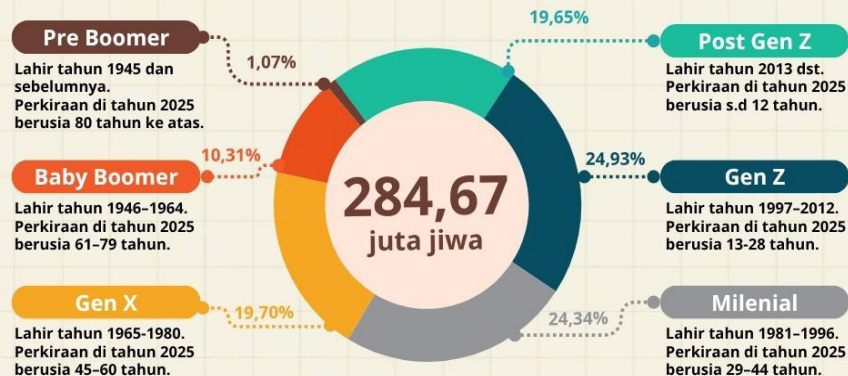
Provinsi	Persentase
(1)	(2)
Aceh	9,56
Sumatera Utara	10,25
Sumatera Barat	12,01
Riau	8,65
Jambi	9,96
Sumatera Selatan	10,65
Bengkulu	10,25
Lampung	11,39
Kepulauan Bangka Belitung	10,26
Kepulauan Riau	8,07
DKI Jakarta	12,01
Jawa Barat	11,51
Jawa Tengah	14,43
DI Yogyakarta	17,83
Jawa Timur	15,45
Banten	9,51
Bali	15,07
Nusa Tenggara Barat	9,72
Nusa Tenggara Timur	9,94
Kalimantan Barat	9,88
Kalimantan Tengah	9,22
Kalimantan Selatan	10,26
Kalimantan Timur	9,05
Kalimantan Utara	8,77
Sulawesi Utara	14,12
Sulawesi Tengah	9,93
Sulawesi Selatan	11,71
Sulawesi Tenggara	8,86
Gorontalo	10,48
Sulawesi Barat	8,81
Maluku	9,57
Maluku Utara	8,58
Papua Barat	6,77
Papua Barat Daya	7,84
Papua	7,98
Papua Selatan	6,81
Papua Tengah	6,71
Papua Pegunungan	8,65
Indonesia	11,97

HASIL SURVEI PENDUDUK ANTAR SENSUS (SUPAS 2025)

Berita Resmi Statistik No. 51/05/Th.XXIX, 5 Mei 2026



PENDUDUK MENURUT GENERASI



FERTILITAS



STRUKTUR PENDUDUK



KEMAMPUAN BAHASA



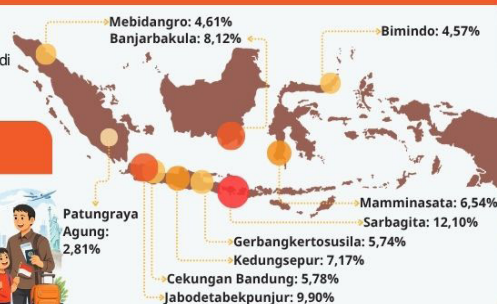
DISABILITAS



MORTALITAS



KOMUTER 10 WILAYAH METROPOLITAN

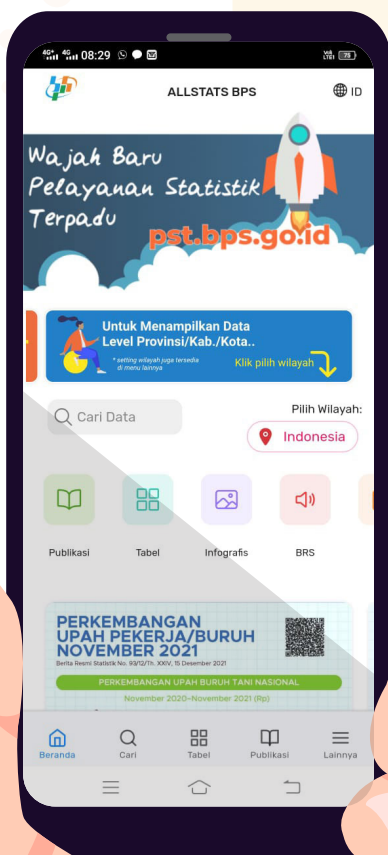


MIGRASI RISEN



BADAN PUSAT STATISTIK
<https://www.bps.go.id>

Gambar 27. Infografis Hasil SUPAS 2025



AllStats BPS

Akses Data BPS
dengan Cepat di
Perangkat Anda

Publikasi, Berita Resmi Statistik, Tabel
Dinamis, dan Pelayanan Statistik Terpadu





Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi:



**Teguh Sugiyarto M.Pop.Hum.Res,
Ph.D.**

Direktur Statistik Kependudukan
dan Ketenagakerjaan

☎ (021) 3810291-5, Ext. 4100

✉ teguhs@bps.go.id

Untuk layanan perpustakaan, penjualan data mikro, publikasi elektronik, publikasi cetakan, dan peta digital wilayah kerja statistik sesuai peraturan yang berlaku maupun konsultasi statistik dapat menghubungi Pelayanan Statistik Terpadu (PST) di pst.bps.go.id

Konten Berita Resmi Statistik dilindungi oleh Undang-Undang, hak cipta melekat pada Badan Pusat Statistik. Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710

Telp : (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax : (021) 3857046

Homepage : <http://www.bps.go.id> E-mail : bps@bps.go.id

